



**PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**



**PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BUKITTINGGI**

PROFIL GENDER DAN ANAK

KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2021

TIM PENULIS:

Pengarah : TATI YASMARNI, SE,MM
Penanggung Jawab : NIRZA SASMITA, S.Sos, MM
Penyusun buku : NINI RAHMI, SKM, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan penulisan buku “Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2021”. Shalawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kota Bukittinggi Tahun 2020. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bukittinggi.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender banyak masalah yang belum terpecahkan akibat dari kurang tersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender belum terwujud secara optimal. Diharapkan dengan adanya buku ini OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan di bidang masing-masing.

Buku ini dapat kami susun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dengan beberapa pihak terkait.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini

2. Bapak / Ibu Kepala OPD , Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Organisasi Perempuan dan LSM di Kota Bukittinggi yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja Data terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2021, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangan saran /pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisinya.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, September 2021
Kepala Dinas P3APKB
Kota Bukittinggi



TATI YASMARNI, SE, MM
NIP. 19630629 198302 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Kegunaan Profil Gender dan Anak.....	6
E. Sumber Data	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	10
A. Letak Geografis.....	10
B. Batas Administrasi Wilayah	10
C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi	13
BAB III STUKTUR KEPENDUDUKAN	14
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	14
B. Penduduk Produktif.....	16
C. Penyebaran Penduduk	19
D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP.....	20
E. Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk Anak.....	21
F. Laju Pertumbuhan Penduduk	23
G. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan.....	24
H. Kepala Keluarga Perempuan	25
BAB IV PENGARUSUTAMAAN GENSER	27
A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	28
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	28
BAB V BIDANG PENDIDIKAN	30
A. Partisipasi Sekolah	31

B. Angka Partisipasi Kasar	34
C. Angka Partisipasi Murni.....	36
D. Melek Huruf dan Buta Huruf	38
E. Angka Putus Sekolah.....	38
F. Rata-rata Lama Sekolah.....	39
G. Sekolah Luar Biasa (SLB).....	40
H. Akses Terhadap Informasi dan Teknologi.....	41
BAB VI BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.	42
A. Angka Harapan Hidup	42
B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI).....	43
1. Penyebab kematian ibu.....	45
2. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) dengan kompetensi kebidanan.....	46
3. Pelayanan kesehatan ibu hamil (Antenatal Care).....	47
4. Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada ibu hamil	48
5. Ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe)	51
C. Angka Kematian Bayi (AKB)	55
1. Cakupan Ibu Nifas Yang Mendapat Kapsul Vitamin A	57
2. Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan < 2500 Gr)	58
3. Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Iniasiasi Menyusui Dini (IMD).....	59
4. Cakupan Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif.....	60
5. Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif.....	61
6. Cakupan Balita 6-59 Bulan Mendapat Kapsul Vitamin A.....	62

7. Cakupan Balita Gizi Kurang yang Dapat Makanan Tambahan	63
8. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	64
9. Jumlah Balita yang Mendapatkan Suplementasi Gizi Mikro	64
10. cakupan Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S).....	65
11. Cakupan Balita Memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) atau Kartu Menuju Sehat (KMS)	66
12. Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D).....	67
13. Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) pada Balita.....	68
14. Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita..	69
D. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	71
E. Status Gizi pada Balita	72
F. Posyandu	73
G. Penderita HIV/AIDS.....	74
H. Keluarga Berencana.....	75
I. Usia Perkawinan Pertama	77
J. Penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).....	78
K. Kota Layak Anak	78
BAB VII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	80
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	80
B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	82
C. Status Pekerjaan	83
D. Kemiskinan.....	84
E. Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja di Kota Bukittinggi tahun 2020.....	84

F. Lapangan Usaha.....	85
G. Perempuan Sebagai Tenaga Kerja Profesional	88
H. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)	89
I. Kepala Keluarga Miskin	91
J .Pekerja Pada Instansi Lembaga Pemerintah	
Atau Non Pemerintah.....	92
BAB VIII BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ..	94
A. Keterwakilan perempuan di lembaga legislative	95
B. Peran dan komposisi perempuan di lembaga	
Eksekutif.....	98
C. Partisipasi perempuan di lembaga yudikatif	104
D. Pengurus organisasi sosial, kemasyarakatan	
dan politik.....	107
BAB IX BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	111
A. Kasus kriminalitas yang di tangani	112
B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
di Kota Bukittinggi.....	113
1. Anak terlantar	113
2. Anak yang ditampung di Panti Asuhan.....	114
3. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	115
4. Perempuan rawan sosial ekonomi	115
5. Penyandang disabilitas	115
6. Jumlah pekerja sosial, karang taruna, tenaga kerja	
sosial di Kota Bukittinggi tahun 2019.....	117
BAB X KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	118
A. Kekerasan Terhadap Perempuan	119
B. Kekerasan Terhadap Anak	126
BAB XI PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.....	12
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2020	15
Tabel 3.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi 2020.....	19
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	21
Tabel 3.4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	22
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020	23
Tabel 3.6	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Hasil Pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2020	25
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Partisipasi Sekolah di Bukittinggi Tahun 2020.....	33

Tabel 5.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2019 Dan 2020	38
Tabel 5.3	Persentase Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Penduduk Umur 10 Tahun Keatas menurut jenis di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	40
Tabel 5.4	Jumlah SLB Negeri dan Swasta per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	40
Tabel 5.5	Persentase Anggota Rumah Tangga Usia 5 Tahun keatas menurut Jenis Kelamin Memiliki atau Menggunakan Teknologi Informasi 3 Bulan Terakhir Tahun 2018	41
Tabel 6.1	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2020	45
Tabel 6.2	Cakupan Persalinan yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	46
Tabel 6.3	Cakupan Pelayanan Antenatal Care per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020	47
Tabel 6.4	Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	49
Tabel 6.5	Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Menurut Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	50

Tabel 6.6	Cakupan Tabel Fe Pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2020	53
Tabel 6.7	Persentase Balita Stunting Menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	70
Tabel 6.8	Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	71
Tabel 6.9	Persentase Status Gizi Berdasarkan BB /U Pada Balita di Kota Bukittinggi Tahun 2020	72
Tabel 6.10	Jumlah Tahun 2020 Posyandu Menurut Strata Posyandu Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	73
Tabel 6.11	Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana menu Menurut Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020	76
Tabel 6.12	Usia Perkawinan Pertama PUS per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	77
Tabel 6.13	Capaian Kota Layak Anak Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020	79
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama seminggu yang Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021	81

Tabel 7.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut status Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2020....	83
Tabel 7.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Bukittinggi Tahun 2020	84
Tabel 7.4 .	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Kegiatan Informal Menurut Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2020 ..	86
Tabel 7.5	Jumlah Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (Ukm) Kota Bukittinggi Tahun 2020	88
Tabel 7.6	Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada Ukm Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2018.....	89
Tabel 7.7	Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	90
Tabel 7.8	Partisipasi Perempuan Sebagai Pengurus Koperasi per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	91
Tabel 7.9	Persentase Kepala Keluarga Miskin per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	91
Tabel 7.10	Tenaga Kerja Di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal.....	92
Tabel 7.11	Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2017 di Kota Bukittinggi ...	92
Tabel 7.12	Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2017	93
Tabel 8.1	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2020	96

Tabel 8.2	Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi Menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2020	98
Tabel 8.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	99
Tabel 8.4	Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020	100
Tabel 8.5	Jumlah PNS Menurut Esselon Dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020	100
Tabel 8.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.....	101
Tabel 8.7	Jumlah Camat Di Kota Bukittinggi Tahun 2018	102
Tabel 8.8	Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020	102
Tabel 8.9	Jumlah Pegawai Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	103
Tabel 8.10	Data Ketenagaan Pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.....	104
Tabel 8.11	Data Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	105
Tabel 8.12	Data Kepolisian Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	106
Tabel 8.13.	Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik Tahun 2018.....	107
Tabel 8.14	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	109

Tabel 8.15	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	110
Tabel 9.1	Jumlah Kasus yang ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020.....	113
Tabel 9.2	Jumlah Anak Yang Ditampung Di Panti Asuhan Di Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai 2020.....	114
Tabel 9.3	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2017, 2018 Dan 2019.....	114
Table 9.4	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2019	116
Tabel.9.5	Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2019.....	117
Tabel 10.1	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur Di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	119
Tabel.10.2	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	120
Tabel 10.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.....	121
Tabel 10.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	122
Tabel 10.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kota Bukittinggi	123
Tabel 10.6	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian di Kota Bukittinggi Tahun 2020	124

Tabel 10.7	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Pelayanan di Kota Bukittinggi.....	124
Tabel 10.8	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Frekuensi Kekerasan di Kota Bukittinggi.....	125
Tabel 10.9	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bukittinggi	125
Tabel 10.10	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis kelamin Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi	126
Tabel 10.11	Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan,Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020	128
Tabel 10.12	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2020	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kota Bukittinggi	12
Gambar 3.1	Angka Ketergantungan Penduduk menurut Jenis Kelamin Bukittinggi 2020	18
Gambar 3.2	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi	26
Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020	28
Gambar 4.2	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi tahun 2017 sampai 2020	29
Gambar 5.1	Persentase Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Partisipasi Sekolah di Kota Bukittinggi tahun 2020	32
Gambar 5.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Bukittinggi tahun 2020.....	35
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Murni menurut jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi tahun 2020	37
Gambar 5.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk berumur 5-18 tahun menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur	37
Gambar 6.1	Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019	43
Gambar 6.2	Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi tahun 2016-2020	44
Gambar 6.3	Persentase Ibu Hamil Anemia Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020	52
Gambar 6.4	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik(KEK) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020	54
Gambar 6.5	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik(KEK) Yang mendapat makanan tambahan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	54
Gambar 6.6	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020.....	57
Gambar 6.7	Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin A di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020	57
Gambar 6.8	Persentase Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan <2500 gr) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2021	58

Gambar 6.9	Cakupan Bayi Batu Lahir mendapat Iniasiasi Menyusui Dini (IMD) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	59
Gambar 6.10	Persentase Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2021	60
Gambar 6.11	Persentase Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2021.....	61
Gambar 6.12	Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	62
Gambar 6.13	Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	63
Gambar 6.14	Cakupan Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020	65
Gambar 6.15	Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	66
Gambar 6.16	Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020	67
Gambar 6.17	Prevalensi Berat Badan Kurang (Kurang dan dan Sangat Kurang) pada Balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	68
Gambar 6.18	Jumlah orang dengan HIV AIDS di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020.....	75
Gambar 7.1	Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	85
Gambar 7.2	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Bukittinggi Tahun 2017 s/d 2020.....	88
Gambar 9.1	Jumlah Anak Terlantar Tahun 2017 sd 2020 di Kota Bukittinggi	113
Gambar 9.2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 s/d 2021	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender pada saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengertian gender dapat disebut sebagai perbedaan peran dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan sesuai kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, kultur, sosial masyarakat, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender (gender equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam peranan dan partisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu keadilan gender (gender equality) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara

penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki control berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2020 hasil proyeksi penduduk sebanyak 121.028 jiwa yang terdiri dari 60.515 jiwa laki-laki dan 60.513 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin 100. Rasio ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan terdapat jumlah yang seimbang. Artinya keberadaan perempuan harus mendapatkan perhatian yang sama dengan laki-laki. Dibanding tahun lalu telah terjadi penurunan jumlah penduduk sekitar 9.745 jiwa . Struktur umur penduduk Bukittinggi masuk kategori kelompok umur muda , dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 25,78 persen, sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 6,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk lebih seperempat penduduk Bukittinggi.

Gambaran kondisi perempuan dan anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambil kebijakan yang tepat. Perempuan dan anak merupakan kelompok penduduk yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan baik saat ini ataupun potensi untuk masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih diukur berdasarkan Indeks

pembangunan Manusia (IPM), atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Upaya dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku **“Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021”** sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi secara menyeluruh di berbagai bidang kondisi data tahun 2020.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mengacu tentang kesetaraan Gender,

Perempuan dan Anak diantaranya;

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

2. Pasal 28 c ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
3. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
6. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan “Profil Gender dan Anak Tahun 2021” dimaksudkan untuk melihat pemerataan pembangunan terhadap perempuan dan anak di Kota Bukittinggi yang berbasis data terpilah yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu penulisan buku ini dapat memberikan gambaran secara umum berdasarkan aspek disabilitas baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi perempuan dan anak.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Bukittinggi tahun 2021 memiliki tujuan;

1. Tersedianya data terpilah Perempuan dan Anak di bidang Pendidikan, kesehatan, Ekonomi, Peran Perempuan di sektor publik, dan bidang-bidang yang menjadi isu Perempuan dan Anak di Kota Bukittinggi
2. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan elemen masyarakat Kota Bukittinggi terkait upaya pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi .
3. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kota Bukittinggi . Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan Gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor Publik, bidang Pemerintahan, posisi di Parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

D. Kegunaan Buku Profile Gender dan Anak

1. Untuk memberikan rekomendasi bagi semua pihak khususnya bagi penyusun kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.
2. Dengan tersedianya informasi yang ada dapat mendorong capaian pembangunan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

E. Sumber Data

Data –data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan anak Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi , Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Instansi Vertikal di Kota Bukittinggi yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-114-2021 tanggal 6 April 2021.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penulisan profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi , lebih spesifik diperjelas dengan landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya program perlindungan perempuan dan anak. Maksud dan tujuan diperuntukkan untuk melihat pemerataan pembangunan yang sudah dilaksanakan terhadap perempuan dan anak, dari mana sumber data. Diakhir bab ini ditutup dengan Sistematika penulisan buku Profil Gender dan Anak.

Bab II Gambaran Umum Wilayah

Memuat tentang gambaran letak geografis , batas administrasi wilayah serta visi dan misi Kota Bukittinggi

Bab III Struktur Kependudukan

Dalam bab ini memuat informasi tentang kependudukan berdasarkan jenis kelamin, penduduk produktif, penyebaran penduduk, kepemilikan KTP, akte kelahiran, Kartu Keluarga, penduduk miskin, status perkawinan dan Kepala keluarga perempuan.

Bab IV Pengarusutamaan Gender

Pada bab ini dijelaskan tentang pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bukittinggi dan dibandingkan dengan capaian di tingkat propinsi Sumatera Barat dan beberapa tahun terakhir.

Bab V Pendidikan

Memuat kondisi pendidikan di Kota Bukittinggi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian diuraikan dengan angka terkait berdasarkan angka usia angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, sertifikasi guru, angka kelulusan paket A ,B dan C , SLB dan penggunaan Teknologi Informasi.

Bab VI Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pada umum ini disampaikan data terkait angka kematian ibu, penyebab kematian serta upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota bukittinggi untuk peningkatan status kesehatan di Kota bukittinggi, , Data HIV AIDS, Keluarga Berencana , usia Perkawinan Pertama serta Penggunaan narkotika,psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Bab VII Ketenagakerjaan

Bab ini menjelaskan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Status Pekerjaan, lapangan Usaha, pekerja sector formal dan informal, Usaha Mikro dan Kecil (UKM), Koperasi dan keterlibatan perempuan disektor ekonomi lainnya.

Bab VIII Perempuan di Sektor Publik Dan Pengambil Keputusan

Untuk perempuan dan pengambil keputusan, dalam bab ini memuat data yang berkaitan dengan pengambil keputusan langsung di pemerintahan dan dari sudut pandang partisipasi baik laki-laki maupun perempuan di bidang **Legislatif** yaitu; jumlah anggota partai politik menurut jenis kelamin dan jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin. Sedangkan di bidang **Eksekutif** memuat data tentang PNS menurut golongan jabatan dan jenis kelamin, dan PNS OPD menurut jenis kelamin. Dalam bidang **Yudikatif** yaitu memuat data jumlah Hakim, Jaksa dan Polisi menurut jenis kelamin di wilayah Kota Bukittinggi.

Bab IX Hukum dan Sosial Budaya

Dijelaskan pada Bab ini tentang kasus terkait Hukum, kebijakan terkait dengan Pengarusutamaan gender dan Anak serta kebijakan yang Responsive Gender, kebijakan terkait perempuan dan anak, Lembaga yang terkait peduli perempuan dan anak, serta data terkait bidang social dan budaya.

Bab X Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Digambarkan dalam bab ini tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis kelamin, pelaku kekerasan, lokasi, latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta hal-hal lain yang terkait dengan data tersebut.

Bab XI Penutup

Memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pengambil keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di Kota Bukittinggi .

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°22' 03" Bujur Timur dan antara 00°17' 08" Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9°C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

B. Batas Administrasi Wilayah

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara :

berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.

2. Sebelah Selatan:

berbatasan dengan Taluak IV Suku; Kecamatan Banuhampu; Kabupaten Agam.

3. Sebelah Barat :

berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.

4. Sebelah Timur:

berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

Bukittinggi merupakan pusat kebudayaan Sumatera Barat, terletak di dataran tinggi sebelah utara Padang di bukit Agam. Berbeda dengan Padang yang merupakan pusat roda pemerintahan dan perdagangan modern maka Bukittinggi adalah kota yang tenang dihiasi oleh panorama alam yang sungguh tiada duanya. Lembahnya yang sangat terkenal adalah Ngarai Sianok dengan kedalaman 100 m dan kemiringan antara 800-900 adalah salah satu daya tarik kota Bukittinggi dijadikan sebagai kota wisata.

Kota Bukittinggi memiliki nama lain yaitu Tri Arga yang artinya tiga pegunungan agung yang memberikan keberuntungan. Keagungan Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago pun ikut menghiasi moleknnya kota Jam Gadang ini. Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat.

Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Gambar 2.1. Peta Kota Bukittinggi.



Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 25,24 km² dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Mandiangin Koto Selayan (MKS)	12,156	48
2.	Guguk Panjang (GP)	6,831	27,06
3.	Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB)	6,252	24,77
Jumlah		25,24	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi Tahun 2021.

C. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

VISI

“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah”

MISI

1. "HEBAT" Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.
2. "HEBAT" Dalam Sektor Pendidikan.
3. "HEBAT" Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.
4. "HEBAT" Dalam Sektor Kepariwisataaan, Seni Budaya dan Olahraga.
5. "HEBAT" Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
6. "HEBAT" Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.
7. "HEBAT" Dalam Sektor Bidang Pertanian.

Humanis; **E**nterpreneur; **B**ijak; **A**gamais/Adil; **T**auladan

BAB III

STRUKTUR KEPENDUDUKAN

Data kependudukan salah satunya digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis kelamin

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Proyeksi penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 121.028 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan disajikan melalui angka rasio jenis kelamin (sex ratio). Sex Ratio penduduk Kota Bukittinggi sebesar 100 %. Artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 100 penduduk laki-laki. Angka sex ratio 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sama banyak dengan penduduk laki-laki.

Distribusi penduduk Kota Bukittinggi menurut jenis kelamin tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

NO	KELOM- POK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		LAKI-LAKI	PEREM- PUAN	LAKI-LAKI + PEREM- PUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	0 – 4	5523	5223	10746	105,74
2	5 – 9	5172	4958	10130	104,32
3	10 – 14	5343	4983	10326	107,22
4	15 – 19	5107	4829	9936	105,76
5	20 – 24	5101	5214	10315	97,83
6	25 – 29	5353	5407	10760	99,00
7	30 – 34	4965	4891	9856	101,51
8	35 – 39	4459	4433	8892	100,59
9	40 – 44	4097	4034	8131	101,56
10	45 – 49	3839	3867	7706	99,28
11	50 – 54	3278	3448	6726	95,07
12	55 – 59	2884	2884	5768	100,00
13	60 – 64	2193	2220	4413	98,78
14	65 – 69	1500	1626	3126	92,25
15	70 – 74	834	1079	1913	77,29
16	75+	867	1417	2284	61,19
JUMLAH		60.515	60.513	121.028	100,00

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2021

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa menurut kelompok usia terdapat beberapa kecenderungan, diantaranya penduduk perempuan lebih banyak pada kelompok umur 60 tahun keatas

Dari data diatas terlihat bahwa perempuan lebih lama hidup dari pada laki –laki dilihat dari sex ratio usia 75 tahun ke atas, itu berarti usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Bila pembahasan difokuskan kepada perempuan terlihat bahwa perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun sebanyak 32.675 jiwa (26,99 % dari jumlah seluruh penduduk Bukittinggi). Ini berarti secara biologis adalah usia reproduksi yang akan berpotensi menjalani proses hamil dan melahirkan. Lebih dari seperempat penduduk perempuan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.

B. Penduduk Produktif

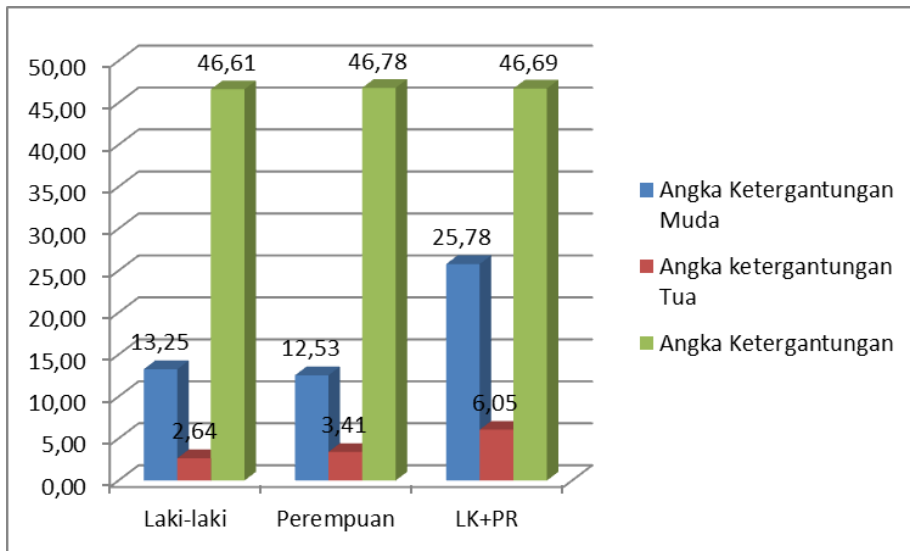
Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15- 64 tahun), belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Penduduk belum produktif disebut juga dengan angka ketergantungan muda, sedangkan tidak produktif lagi disebut dengan angka ketergantungan tua.

Dependensi ratio Kota Bukittinggi adalah 46,69 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia tidak produktif. Bila dilihat berdasarkan gender, maka penduduk perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.

Jika dilihat dari sisi ekonomi maka kelompok usia 15 sampai 64 tahun terdapat 41.227 jiwa (49,97%) penduduk perempuan yang masuk usia perempuan produktif. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan tersebut serta mendukung ekonomi keluarganya. Untuk itu bagi perempuan yang belum bekerja perlu mendapatkan pembinaan dan pembekalan keterampilan untuk berusaha. Angkatan kerja perempuan akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan apabila jumlah angka tersebut memenuhi persyaratan, Pertama jumlah penduduk perempuan yang terjun kepasar kerja (angkatan kerja) harus optimal. Angka ketergantungan tidak terlalu tinggi artinya jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tidak terlalu tinggi.

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relatif terhadap penduduk usia belum/tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah perkapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Gambar 3.1 Angka Ketergantungan Penduduk menurut JenisKelamin Bukittinggi 2020



Sumber : BPS Bukittinggi 2021

Pada grafik diatas terlihat, angka ketergantungan usia muda lebih besar dari pada angka ketergantungan usia tua, hal ini akan berdampak kepada fasilitas sosial dan ekonomi yang mesti dipersiapkan , seperti fasilitas kesehatan, pendidikan , ekonomi dan fasilitas lainnya yang mendukung terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dari pada laki-laki, oleh sebab itu prioritas pembangunan hendaklah lebih memprioritaskan kepada perempuan.

Jumlah golongan penduduk usia tua (75+) juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi.

C. Penyebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

Tabel 3.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi, 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jml Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk
1.	Guguk Panjang	6.831	41.391	34,20	6.059	-0,06
2.	Mandiingin Koto Selayan	12.156	53.035	43,82	4.363	1,62
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	6.252	26.602	21,98	4.255	0,70
Hasil Registrasi		25.239	121.028	100	4.795	0,81

Sumber: BPS Kota Bukittinggi.2021

Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di kecamatan Mandiingin Koto Selayan yaitu 53.035 jiwa (43,82%) dan paling sedikit di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 26.602 jiwa (21,98%).

Namun Kecamatan dengan tingkat kepadatan yang paling tinggi yaitu kecamatan Guguk Panjang yaitu 6 059 jiwa per km², diikuti oleh kecamatan Mandiingin Koto Selayan sebanyak 4.363

jiwa per km² dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.255 jiwa per km².

Ditinjau dari penyebaran penduduk berdasarkan luas daerah, kepadatan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sudah tergolong sangat padat, yaitu 4 795 jiwa per km². Berarti tiap km² terhuni oleh penduduk sebanyak 4.795 jiwa. Penyebaran penduduk pada tahun 2020 menurun sebanyak 386 jiwa dibandingkan dengan penyebaran penduduk pada tahun 2019 sebesar 5.181 per km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk klasifikasi sangat padat dan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk kota Bukittinggi yang demikian disebabkan salah satunya karena wilayah Kota Bukittinggi sendiri hanya mencakup 0.06% saja dari total luas Propinsi Sumatera Barat disamping berkembangnya kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan di Sumatera Barat.

Dari Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 secara proyeksi terdapat laju sebesar 0,81%, terlihat bahwa terjadi penurunan dari tahun 2019 (1,55 %) yaitu sebesar 0,74 %.

D. Komposisi Penduduk Menurut Wajib KTP

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2020 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,95 % penduduk

wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.

Tabel. 3.3. Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP dan Telah Memiliki KTP Elektronik Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

NO	Kecamatan	Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP Elektronik	%
1	G. Panjang	41.391	31.491	31.476	99,95
2	MKS	53.035	37.789	37.771	99,95
3	ABTB	26.602	19.047	19.042	99,97
JUMLAH		123.296	88.327	88.289	99,95

Sumber: Disdukcapil Kota Bukittinggi Tahun 2021

Bila dilihat perkembangan kepemilikan KTP Elektronik dari tahun 2020 telah mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yaitu dari 99,8 % meningkat menjadi 99,95 % ditahun 2020.

E. Kepemilikan Akte Kelahiran untuk Anak

Hak Sipil anak adalah hak asasi yang melekat pada pribadi seseorang (anak) sebagai seorang individu unik ditengah masyarakat sehingga ia bisa mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya secara leluasa termasuk hak identitas anak. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akte

kelahiran. Lebih lanjut Akte Kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Salah satu hak sipil anak adalah mendapatkan akte kelahiran seperti yang tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari penduduk usia 0-18 tahun, yang telah memiliki akte kelahiran di Kota Bukittinggi sekitar 93,79%, yang terdiri dari 45,4% anak perempuan dan 48,3% anak laki- laki-, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Presentase Anak Usia 0-18 tahun yang Memiliki Akte Kelahiran menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No.	Kec.	JML PENDUDUK 0-18 TH			AKTE KELAHIRAN			%
		Laki-laki	Perempuan	Jml	Laki-laki	Perempuan	Jml	
1.	GP	7.622	7.052	14.674	7.141	6.610	13.751	93,71
2.	MKS	9.284	8.794	18.078	8.646	8.305	16.951	93,77
3.	ABTB	4.929	4.496	9.425	4.611	4.243	8.854	93,94
Jumlah		21.835	20.342	42177	20398	19158	39.556	93,79

Sumber :Disdukcapil Kota Bukittinggi Tahun 2021

Sedangkan penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran masih terdapat sebanyak 6,21 % atau 2.621 orang .

F. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dibawah ini dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk
2017	1,68
2018	1,56
2019	1,55
2020	0,81

Sumber : BPS Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bukittinggi, hal ini menggambarkan adanya kebersihan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bukittinggi.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas P3APKB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut :

- 1, Memfasilitasi alat dan obat Kontrasepsi secara gratis
2. Melakukan pelayanan berkala di fasilitas kesehatan dan pelayanan serentak yang dikerjaksamakan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan penyuluh lapangan KB (IpeKB), TNI,TP,PKK
3. Menyediakan biaya layanan kegagalan program KB
4. Memberikan testimoni kepada calon akseptor oleh akseptor sukses
5. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai model seperti KIE perorangan, KIE Kelompok, KIE Media Masa dan KIE Melalui mobil penerangan KB (MUPEN)

6. Memfasilitasi KIE KIT untuk kader, kelompok kegiatan dan Generasi Berencana (GenRe) KIT untuk pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) jalur pendidikan dan masyarakat
7. Mengkampanyekan hindari 4 T melalui berbagai penyuluhan yaitu:
 - Tidak melahirkan terlalu muda,
 - Tidak melahirkan terlalu tua
 - Tidak melahirkan terlalu banyak
 - Tidak melahirkan terlalu rapat
8. Mengembangkan program Ketahanan Remaja melalui kegiatan PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat dengan konsentrasi program:
 - Tidak menikah diusia dini
 - Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
 - Memberikan pemahaman Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
9. Mengembangkan kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
10. Menggerakkan Program KB
11. Membentuk dan Mensosialisasikan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi.

G. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung status perkawinan akan

mempengaruhi tingkat kelahiran. Umumnya suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 3.6. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan Hasil Pendataan Keluarga di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No	Kecamatan	Jml Kepala Keluarga	Belum kawin		Kawin		Janda/ Duda	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Guguk Panjang	8.872	114	1,28	6.826	76,94	1.932	21,78
2.	Mandiingin K.Selayan	11.376	170	1,49	9.093	79,93	2.113	18,57
3.	Aur Birugo Tigo Baleh	5.744	49	0,85	4.729	82,33	966	16,82
4.	Bukittinggi	25.992	333	1,28	20.648	79,44	5.011	19,28

Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI Dinas P3APPKB Tahun 2021.

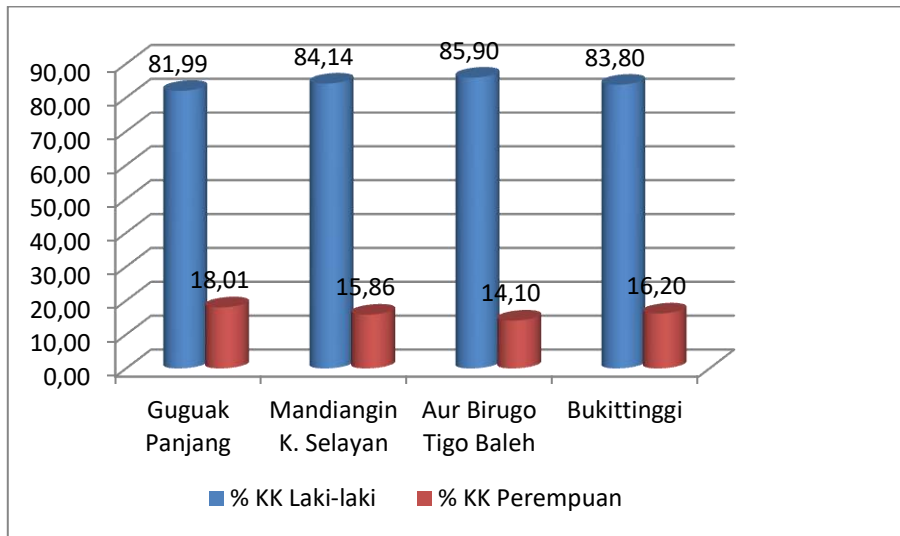
Tabel diatas menggambarkan bahwa 79,44 % dari kepala keluarga yang berstatus kawin, selain dari itu berstatus belum kawin dan janda /duda.

H. Kepala Keluarga Perempuan

Kepala Keluarga tidak hanya berjenis kelamin laki-laki saja tetapi perempuan pun ada yang berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan dalam sebuah keluarga, seperti memilihkan pendidikan untuk anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan suatu daerah.

Di bawah ini memperlihatkan persentase Kepala rumah tangga menurut jenis kelamin tahun 2020.

Gambar 3.2. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi



Sumber: Pendataan Keluarga/PBDKI

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 4212 orang atau 16,20% kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah suatu perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat dan bersifat dinamis . Beragam *stereotype* terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang dimasyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, lemah, sensitif dan pandai merayu.

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama adalah :

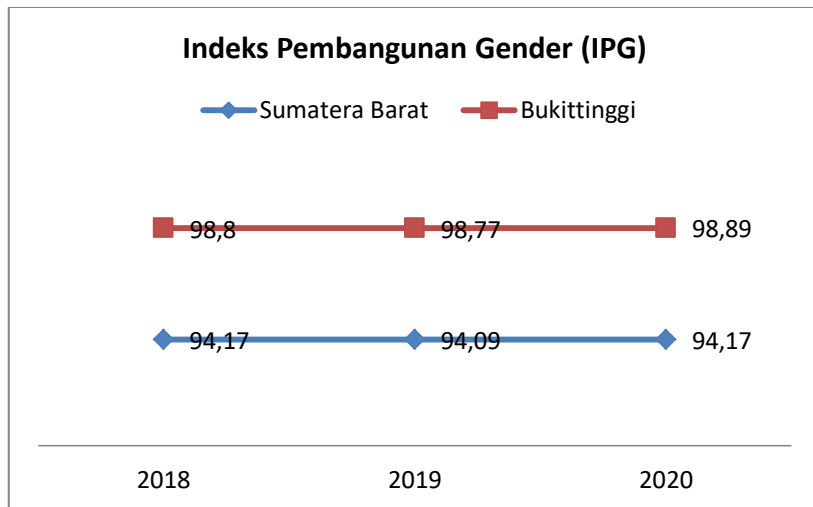
1. Komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai,
2. Kelembagaan PUG yang bertanggung jawab,
3. SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG
4. Anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran,
5. Gender Analisis,
6. Data terpilah
7. Peran masyarakat.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bukittinggi pada 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari IPG Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.



Sumber : BPS Sumatera Barat Tahun 2021

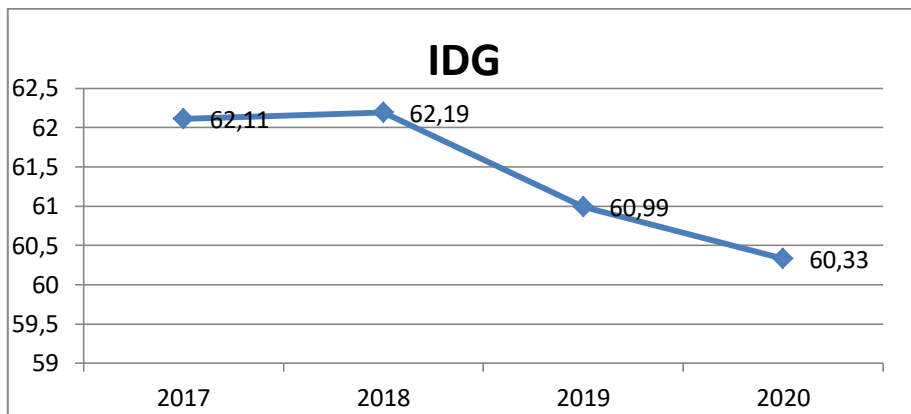
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator

keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

Berdasarkan data Statistik , IDG Kota Bukittinggi sejak tahun 2017 masih belum menggembirakan , karena dibandingkan dengan kabupaten Kota lain yang ada di Propinsi Sumatera Barat, Bukittinggi masih belum bisa mengungguli, seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut;

Gambar 4.2 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai 2020



Sumber ; Badan Pusat Statistik

Dari grafik diatas terlihat bahwa IDG Kota Bukittinggi mengalami penurunan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Penurunan ini disebabkan karena masih rendahnya peran aktif wanita di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, hal ini bisa dilihat dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

BAB V

BIDANG PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian juga peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas yang baik tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdayakan. Tanpa mengenyampingkan laki-laki sebagai kepala rumah

tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada bab ini. Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, angka buta huruf, angka putus sekolah dan akses internet.

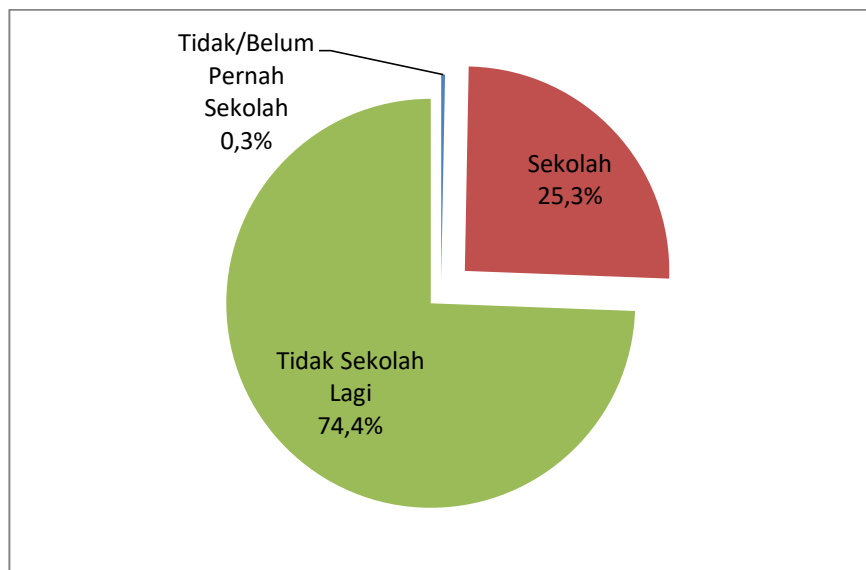
A. Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah, antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun non formal, apakah tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Seseorang dengan status masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs,

pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada dibawah pengawasan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kementerian Agama (Kemenag) dan Instansi lain yang terkait.

Persentase penduduk yang masih sekolah dapat digunakan untuk mengukur tingkat perluasan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya.

Gambar.5.1 Persentase Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Partisipasi Sekolah di Kota Bukittinggi Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Pada gambar diatas terlihat bahwa sekitar 25,3 persen penduduk umur 10 tahun keatas di kota Bukittinggi yang berpartisipasi sekolah, 74,4 persen Tidak sekolah lagi, dan hanya 0,3 persen yang tidak/ belum pernah sekolah .

Tabel 5.1 Persentase Penduduk usia 7-24 Tahun menurut jenis kelamin , kelompok umur, Partisipasi sekolah di Bukittinggi Tahun 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki			
7-12		99,9	0,1
13-15		96,8	3,2
16-18		90,9	9,1
19-24		36,2	63,8
7 - 24		80,95	19,05
Perempuan			
7-12		100	
13-15		100	
16-18		84,4	15,6
19-24		42,4	57,6
7 - 24		81,7	18,3
Jumlah Total			
7-12	0	99,9	0,1
13-15	0	98,4	1,6
16-18	0	87,3	12,7
19-24	0	39,7	60,3
7 - 24	0	81,33	18,68

Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel diatas memberikan gambaran tentang partisipasi sekolah penduduk usia 7 -24 tahun. Sebagian besar penduduk 7-24 tahun yang masih bersekolah, yaitu 81,33%. Sedangkan 18,68 % tidak sekolah lagi. Bila dilihat dari kelompok umur, terlihat bahwa pada usia 7 tahun sampai 18 tahun (jenjang SD sampai dengan SMA) partisipasi sekolah masih cukup tinggi, tetapi pada usia 19 sampai dengan 24 tahun (jenjang perkuliahan) terlihat masih rendahnya partisipasi sekolah .

Pada tabel juga terlihat bahwa partisipasi sekolah anak usia 7 – 24 tahun menurut jenis kelamin. Anak perempuan memiliki akses pendidikan lebih baik dari pada anak laki-laki, hal ini dapat dilihat

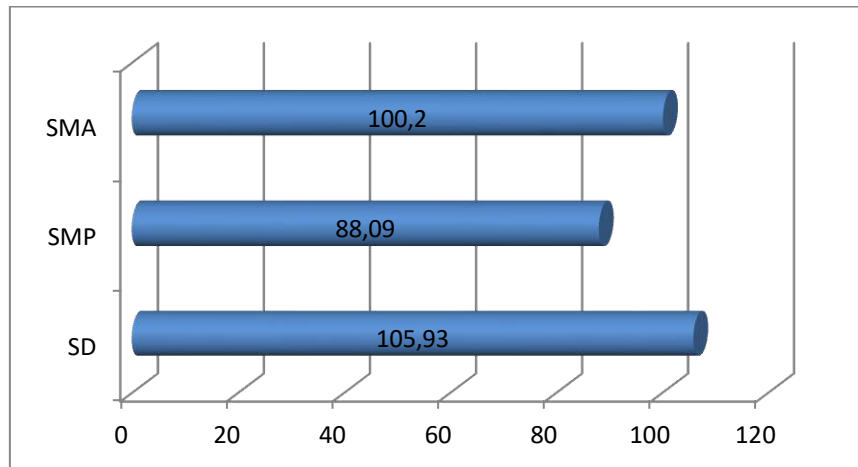
dari persentase anak laki-laki yang masih bersekolah sebesar 80,95 persen, lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan , yaitu 81,7 persen. Sebaliknya anak laki-laki yang tidak bersekolah lagi sedikit lebih tinggi yaitu 19,05 persen dibanding perempuan. Persentase anak perempuan yang tidak sekolah lagi adalah 18,30 persen.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut,

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 5.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Bukittinggi Tahun 2020



Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa APK siswa SD /MI sudah melebihi nilai 100%, yaitu 105,93 %. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda. Faktor lain yang menyebabkan APK melebihi 100% adalah adanya siswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi yang bersekolah di Bukittinggi.

Salah satu penyebab tingginya APK tingkat jenjang pendidikan SLTP di Kota Bukittinggi adalah karena peminatan dan daya tampung pendidikan jenjang SLTP di Kota Bukittinggi lebih besar, sebab Bukittinggi merupakan kota pendidikan yang memiliki fasilitas pendidikan dan mutu yang cukup baik di Sumatera Barat.

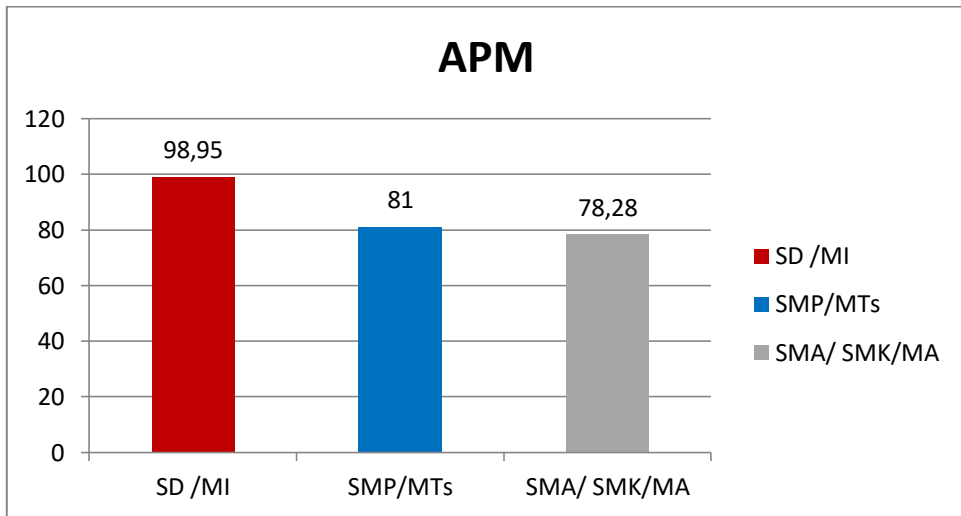
C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 sampai dengan 18 tahun) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Gambar berikut menunjukkan Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

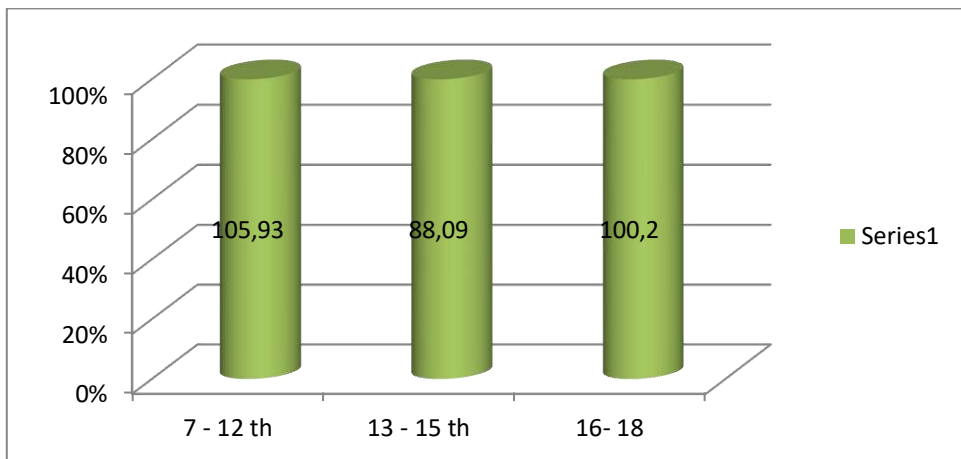
Gambar 5.3. Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2020



Sumber : Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2021

Pada gambar diatas terlihat bahwa APM terendah pada jenjang pendidikan SMA / SMK/ MA. Hal ini menggambarkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut masih terdapat anak yang sekolah tidak tepat waktu, terlalu cepat atau terlalu lambat masuk SMA /SMK / MA.

Gambar 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur



Sumber : BPS 2021

D. Melek Huruf dan Buta Huruf

Melek Huruf didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik mutu sumber daya manusia dalam masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis (baca tulis) merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk menuju hidup sejahtera.

Persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2020 adalah sebesar 99,91 % laki-laki , dan 100 % perempuan. Hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program keaksaraan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Kota Bukittinggi Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Kelamin	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Laki-laki	99,46	99,91
2	Perempuan	99,69	100
	Bukittinggi	99,58	99,96

Sumber Data : BPS Tahun 2021

E. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Bukittinggi pada tahun 2020 adalah sebanyak 11,3 %, Berdasarkan data dari UNICEF, faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Anak-anak dari 20 persen keluarga termiskin hampir lima kali lebih mungkin untuk

tidak masuk SD dan SMP, dibandingkan 20 persen dari keluarga terkaya.

UNICEF mengungkapkan bahwa status ekonomi keluarga, memiliki dampak yang paling signifikan pada kehadiran anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.

Oleh sebab itu penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas dalam pembangunan khususnya di Bukittinggi.

F. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS)/ Mean years of schooling (MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Tahun 2020 Kota Bukittinggi mempunyai rata-rata lama sekolah 11,33 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Bukittinggi sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formalnya. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara tersebut.

Keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan sebagian besar penduduk. Berdasarkan data susenas 2020, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas adalah SLTA ke bawah dengan presentase mencapai 39,6 %.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki di Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 5.3 Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Pendidikan Tertinggi	%
1	Tidak Punya Ijazah	7,5
2	SD Sederajat	11,2
3	SLTP sederajat	20,6
4	SLTA sederajat	39,6
5	Diploma I/II/III	7,3
6	D IV / S1/S2/S3	13,9

G. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Tabel 5.4. Jumlah SLB Negeri dan Swasta Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No	Kec.	SLB Negeri					SLB Swasta				
		TK	SD	SLTP	SLTA	Jml	TK	SD	SLTP	SLTA	Jml
1	MKS	0	1	0	0	1	0	3	1	0	4
2	G.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ABTB	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Jumlah			1			1		5	1		6

Sumber: Disdikbud Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Pada tabel diatas terlihat bahwa Sekolah Luar Biasa di Kota Bukittinggi tersedia ditingkat SD dan SLTP. Ketersediaan SLB ini bisa memfasilitasi para anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga bisa mendapatkan haknya terhadap pendidikan di Kota Bukittinggi.

H. Akses terhadap Informasi dan Teknologi

Tabel 5.5 Persentase anggota Rumah Tangga usia 5 tahun keatas menurut Jenis Kelamin memiliki/ menggunakan Teknologi Informasi 3 bulan terakhir Tahun 2018

Jenis Kelamin	Memiliki telpon seluler (HP)/Nirkabel	Memiliki telpon seluler (HP)/ Nirkabel atau komputer (PC/Desktop/Laptop, Notebook, tablet)	Mengakses Internet
Laki-laki	80,02	87,49	60,16
Perempuan	79,54	88,59	58,6
Rata-rata	79,78	88,04	59,38

Dari tabel 5.5 diatas terlihat bahwa penggunaan telpon seluler (HP)/Nirkabel atau komputer (PC/Desktop/Laptop, Notebook, tablet) sudah mencapai 88,04 %, yang berarti sistem komunikasi dan informasi serta teknologi sudah semakin mudah dan semakin cepat terakses oleh masyarakat.

Akses terhadap internet juga sudah dipergunakan oleh 59,38% masyarakat, hal ini berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, terutama pada generasi muda. Dampak positif yang terjadi adalah semakin mudahnya masyarakat untuk menambah pengetahuan, mudahnya komunikasi, mempermudah dunia bisnis sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dampak negatif penggunaan internet ini adalah semakin mudahnya anak dibawah umur mengakses tontonan yang berbaur pornografi serta games on line yang menyebabkan anak menjadi kecanduan terhadap tontonan ini.

BAB VI

BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, pemerintah selalu berupaya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan perempuan di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup dan angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan (morbidity rate) , juga bisa dilihat pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Program Keluarga Berencana juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/ cara KB, jenis-jenis alat ber KB yang digunakan dan jumlah anak lahir hidup. Sementara usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat / cara ber KB.

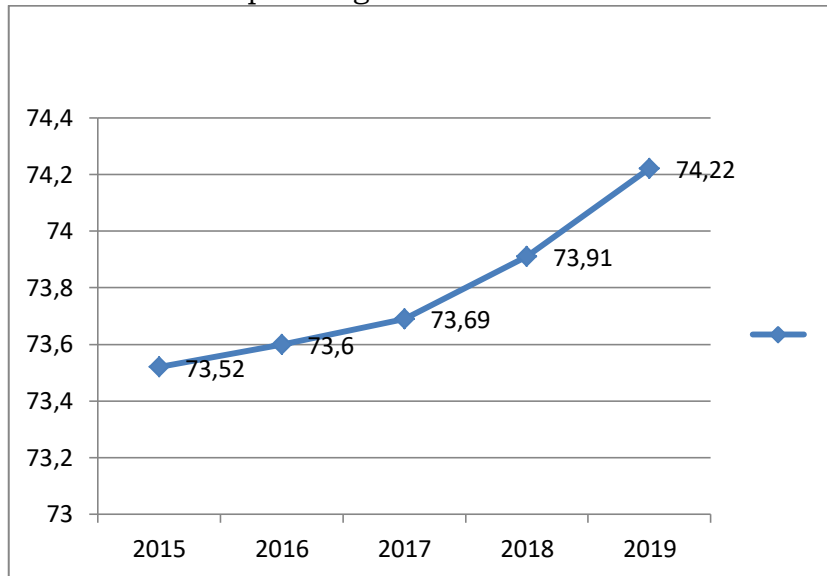
A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penghitungan angka harapan hidup dengan menghitung rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki sistem pendataan kematian berdasarkan kelompok umur. "Jadi angka harapan hidup berhubungan erat dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi.

Gambar dibawah ini menunjukkan peningkatan Umur harapan Hidup penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2015 samapai dengan tahun 2019.

Gambar 6.1 Umur harapan Hidup Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020

Gambar diatas memperlihatkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

B. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

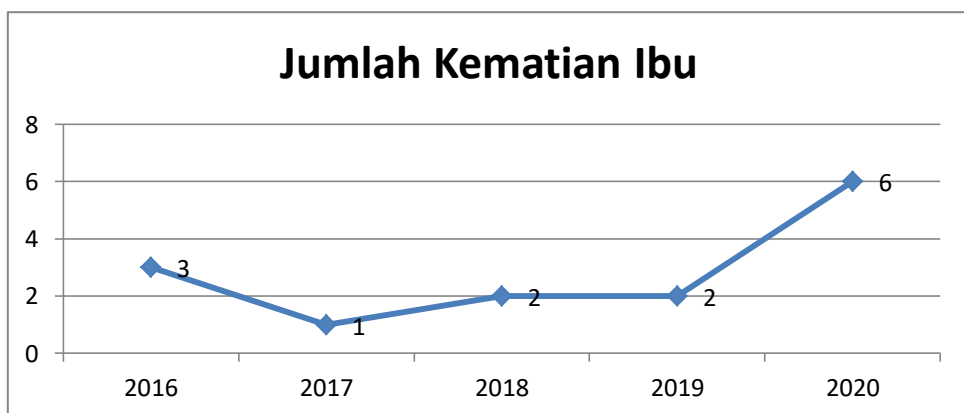
Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Gambar 5.2 berikut terlihat kecendrungan jumlah kematian ibu maternal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kota Bukittinggi.

Gambar 6.2. Jumlah Kematian Ibu di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah 6 jiwa. Kasus ini mengalami peningkatan kasus dibanding 4 tahun terakhir.

1. Penyebab Kematian Ibu

Dari 2 kasus kematian Ibu pada tahun 2020, penyebabnya adalah pendarahan, hipertensi dalam kehamilan dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Penyebab kematian Ibu Tahun 2020

No	Kecamatan	Pen dara han	Hipert ensi dlm keham ilan	Infe ksi	Ggn Sistem Peredara n Darah	Ggn. Metabol ik	Lain - Lain
1	G.Panjang	0	0	0	0	0	1
2	MKS	2	1	0	0	0	1
3	ABTB	1	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	1	0	0	0	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2021

2. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) dengan Kompetensi Kebidanan

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional).

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan yang bertujuan untuk mengamankan proses persalinan .

Tabel 6.2 Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan (Linakes) Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Linakes		
		Sasaran	Absolut	%
1	Guguk Panjang	710	591	83,1
2	Mandiingin Koto Selayan	849	831	99,05
3	ABTB	478	448	93,7
Jumlah		2037	1870	91,8

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Antenatal Care)

Ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam siklus pertumbuhan dan perkembangan anak, begitu juga dengan ibu hamil. Gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin dalam kandungan, bahkan gangguan tersebut jika tidak cepat ditanggulangi, akan berlanjut sampai setelah ia lahir, masa balita dan remaja. Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan (Nakes) profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling

Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Th.2021

sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan ante natal (K1 dan K4) di Kota Bukittinggi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3. Cakupan Pelayanan Antenatal Care Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4	
			Jml	%	Jml	%
1	GP	743	632	84,75	578	77,65
2	MKS	890	913	102,9	891	100,5
3	ABTB	502	480	95,9	474	94,4
Jumlah		2.135	2025	94,8	1943	91

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 94,8 % ibu hamil di wilayah Kota Bukittinggi sudah mendapatkan pelayanan Antenatal Care pertama kali, sedangkan persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan sebanyak 91 %.

Untuk pelaksanaan ANC terpadu pada Ibu Hamil, Dinas kesehatan melalui UPTD Puskesmas melaksanakan kegiatan yang berintegrasi dengan program lain, antar lain :

- Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anak (PPIA)
- Pencegahan malaria dalam Kehamilan (PMDK)
- TB dalam Kehamilan
- Kecacingan dalam Kehamilan
- Pencegahan IMS dalam Kehamilan

- Pencegahan Hepatitis B dalam Kehamilan
- Pemeriksaan Hb,KEK,Protein Urin, Gula Darah
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.

4. Immunisasi Tetanus Toxoid dan Difteri (Td) pada Ibu Hamil

Vaksin DTP jenis Tdap, direkomendasikan untuk diberikan pada ibu hamil di usia kehamilan 27-36 minggu atau segera setelah bayi lahir. Vaksin ini dapat diberikan, tanpa mempertimbangkan kapan terakhir kali ibu hamil mendapatkan vaksin Tdap atau Td (tetanus-diphtheria) Immunisasi Vaksin Td yang disuntikkan berisi *booster* (penguat) berupa anti-tokso. Ini berfungsi menguatkan kekebalan tubuh.

Untuk wanita hamil boleh divaksin Td. Syaratnya, wanita hamil baru boleh divaksin difteri pada trimester ke-2 atau trimester ke-3. Karena kalau masih trimester pertama itu usia kehamilannya masih rentan dan bahaya buat pembentukan janin di awal kandungan . Kekebalan tubuh pun baru terbentuk biasanya dua minggu kemudian setelah divaksin.

Tabel 6.4 Cakupan Immunisasi Td pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kec	Jml Bumil	Immunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Guguk Panjang	756	120	15,9	121	16,0	129	17,1	123	16,3	120	15,9	493	65,2
2	Aur Birugo Tigo Baleh	522	86	16,5	166	31,8	174	33,3	87	16,7	27	5,2	454	87,0
3	Mandiingin Koto Selayan	1.141	154	13,5	230	20,2	211	18,5	172	15,1	157	13,8	770	67,5
	Kota Bukittinggi	2.419	360	14,9	517	21,4	514	21,2	382	15,8	304	12,6	1.717	71,0

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

Tabel.6.5 Cakupan Immunisasi Td pada Wanita Usia Subur menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kec	Jml WUS Tdk Hamil (15-35 TH)	Immunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	Guguk Panjang	6.540	94	1,4	91	1,4	81	1,2	70	1,1	80	1,2
2	Aur Birugo Tigo Baleh	4.515	12	0,3	18	0,4	29	0,6	15	0,3	10	0,2
3	Mandiingin Koto Selayan	9.863	252	2,6	72	0,7	53	0,5	52	0,5	96	1,0
	Kota Bukittinggi	20.918	358	1,7	181	0,9	163	0,8	137	0,7	186	0,9

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2020

5. Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Zat besi merupakan tablet mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Unsur Fe merupakan unsur paling penting untuk pembentukan sel darah merah. *Zat besi* secara alamiah didapatkan dari makanan. Jika manusia kekurangan zat besi pada menu makanan yang dikonsumsinya sehari-hari, dapat menyebabkan gangguan anemia gizi (kurang darah). Tablet zat besi (Fe) sangat dibutuhkan oleh wanita hamil, sehingga ibu hamil diharuskan untuk mengonsumsi tablet Fe minimal sebanyak 60 tablet selama kehamilannya.

Manfaat Zat Besi (Fe)

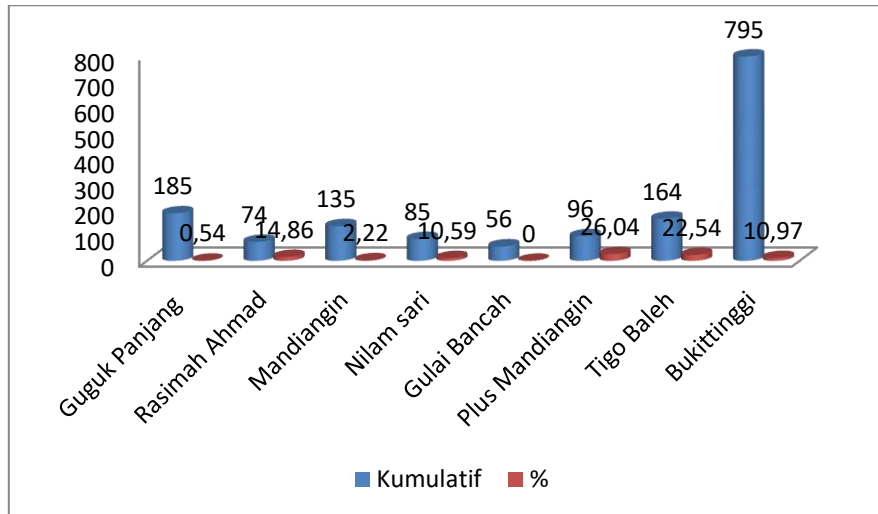
Zat besi (Fe) berperan sebagai sebuah komponen yang membentuk *mioglobin*, yakni protein yang mendistribusikan oksigen menuju otot, membentuk enzim, dan kolagen. Selain itu, zat besi juga berperan bagi ketahanan tubuh.

Tablet zat besi (Fe) penting untuk ibu hamil karena memiliki beberapa fungsi berikut ini:

- Menambah asupan nutrisi pada janin
- Mencegah anemia defisiensi zat besi
- Mencegah pendarahan saat masa persalinan
- Menurunkan risiko kematian pada ibu karena pendarahan pada saat persalinan.

Ibu Hamil Anemia

Gambar 6.3 Persentase Ibu Hamil Anemia Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



Berdasarkan grafik 1 diketahui bahwa Persentase Ibu Hamil Anemia Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 10,97% sedangkan target nasional sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator persentase ibu hamil anemia di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan anemia, salah satunya adalah dengan pemberian tablet zat besi, Cakupan distribusi tablet Fe di Kota Bukittinggi Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

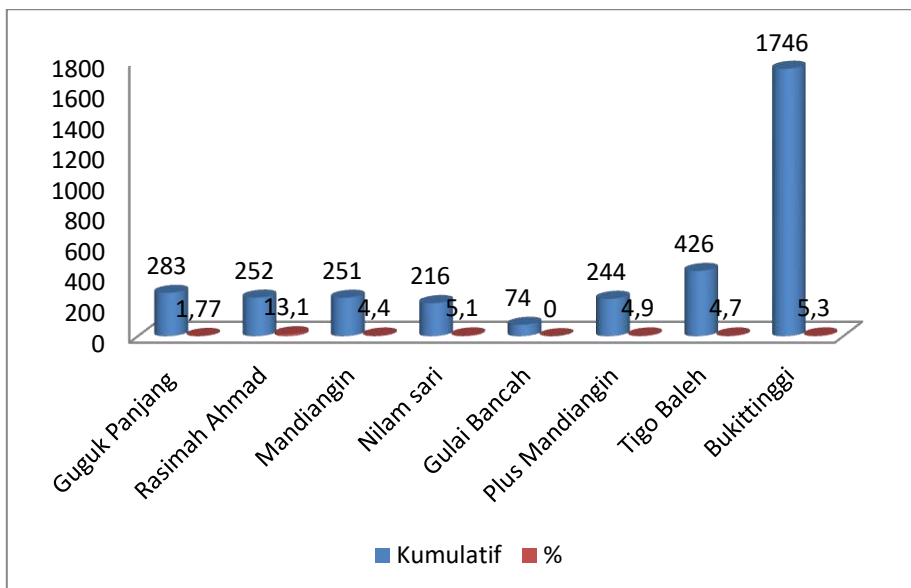
Tabel.6.6 Cakupan Tablet Fe pada Bumil Per Kecamatan Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL	FE3 (90 TABLET)	
			JUMLAH	%
1	Mandiingin Koto Selayan	1141	952	86,29
2	Guguk Panjang	756	660	87,64
3	Aur Birugo Tigo Baleh	522	379	72,61
KotaBukittinggi		2419	1991	82,31

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2021

Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

Grafik 6.4. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



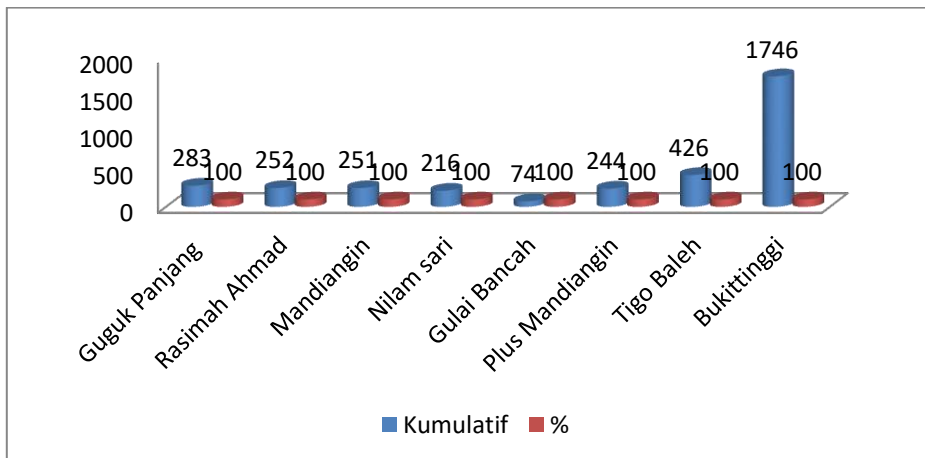
Berdasarkan grafik 2 diketahui bahwa Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Tahun 2020 adalah 5,3 % sedangkan target nasional sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Rasimah Ahmad yaitu 13,1% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Gulai Bancah yaitu sebesar 0%.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk penanggulangan ibu Hamil kekurangan Energi Kronis adalah dengan memberikan makanan tambahan. Berikut adalah cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat Makanan Tambahan

Gambar 6.5 Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat Makanan Tambahan Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat Makanan Tambahan Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 100% sedangkan target nasional sebesar 80%. Hal ini

menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat Makanan Tambahan sudah tercapai. Dilihat dari grafik diketahui bahwa semua Puskesmas sudah mencapai target (100%).

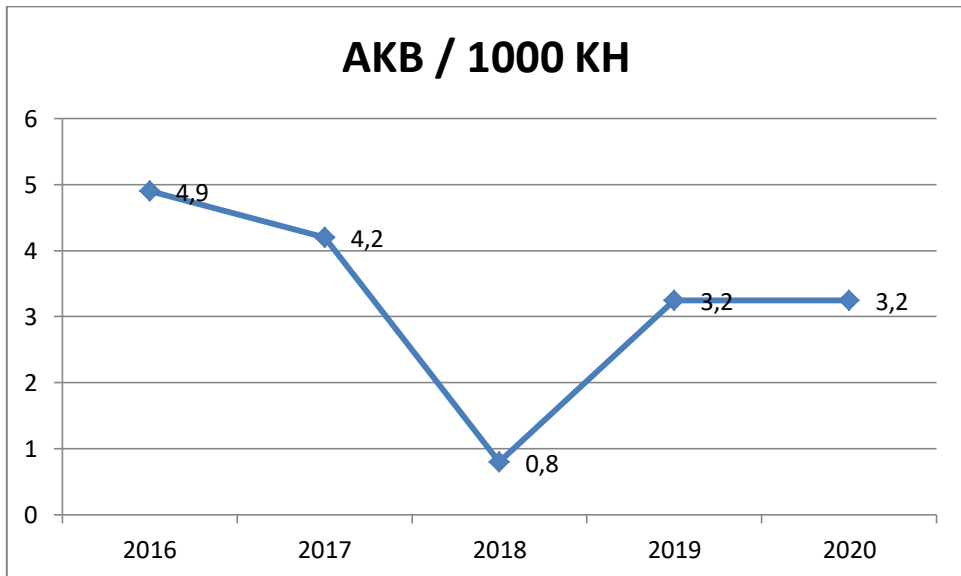
C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Jumlah Kematian Bayi di Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebanyak 7 kasus, atau Angka Kematian Bayi sebesar 3,2 /1.000 kelahiran hidup. Angka ini sama dengan tahun 2019 . Grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 6.6. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Bukittinggi Tahun 2016-2020.



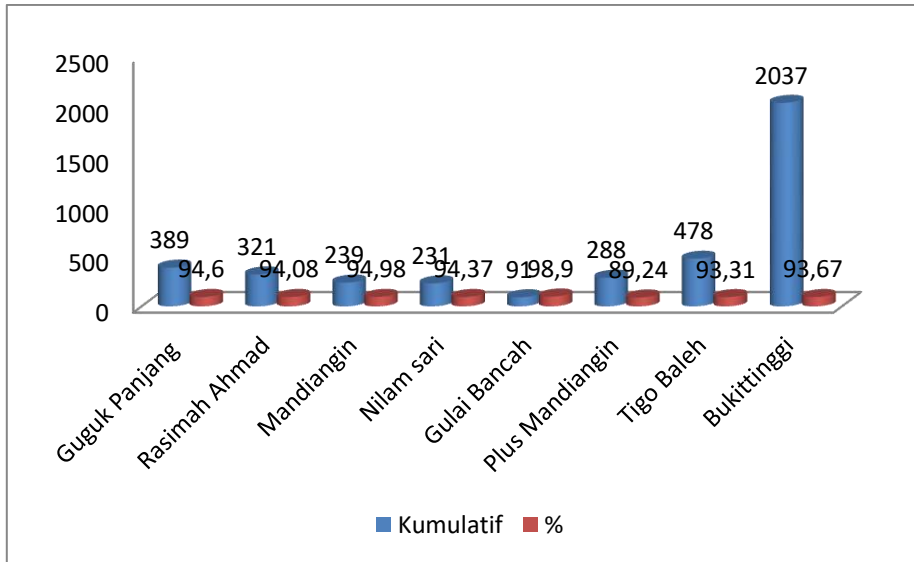
Sumber : Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021

Grafik diatas memperlihatkan kasus kematian bayi pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019.

Bayi usia kurang dari satu bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Itulah kenapa bayi yang baru lahir perlu mendapatkan perhatian khusus supaya kesehatannya tetap optimal. Sebab jika tidak, hal ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

1. Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin

Gambar 6.7 Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin A Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



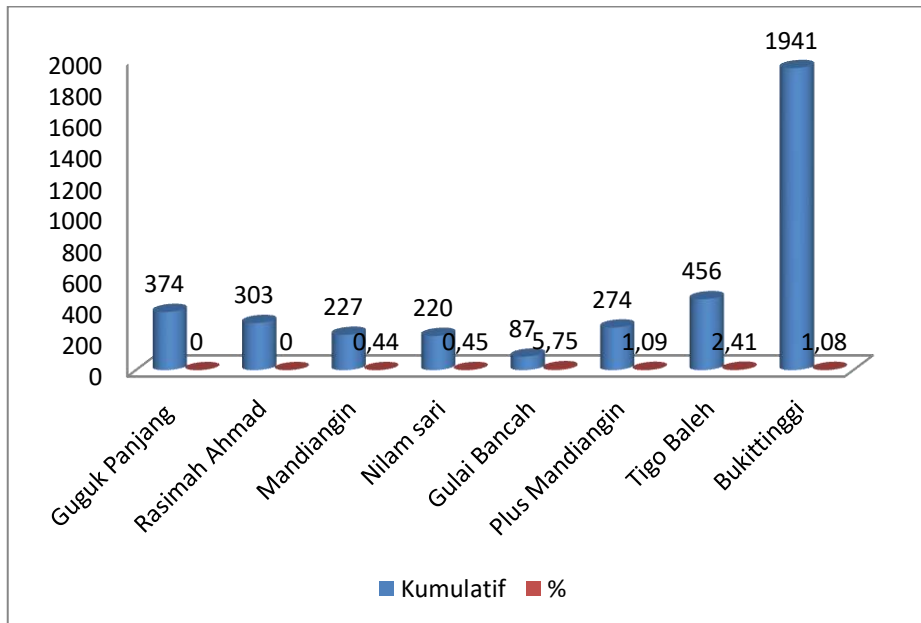
Berdasarkan grafik 6.7 diketahui bahwa Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin A Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 93,67% sedangkan target nasional sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Ibu Nifas yang mendapat Kapsul Vitamin A di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Gulai Bancah yaitu 98,9% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Plus Mandiangin yaitu sebesar 89,24%.

2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah

(Berat badan < 2500 gr)

Gambar 6.8 Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat badan < 2500 gr) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020

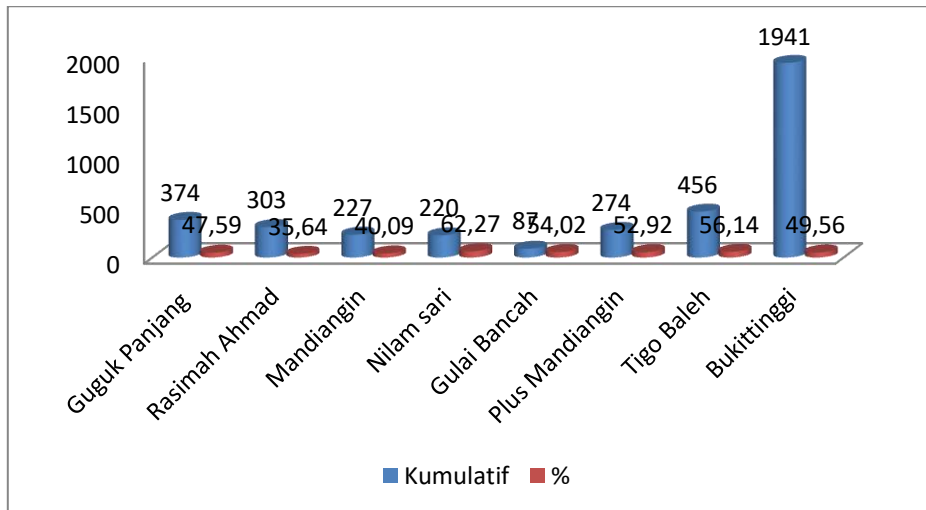


Berdasarkan grafik 6.8 diketahui bahwa Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat badan < 2500 gr) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 1,08% sedangkan target nasional sebesar 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat badan < 2500 gr) di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi dan belum mencapai target nasional berada di Puskesmas Gulai Bancha yaitu 5,75% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Rasimah Ahmad dan Puskesmas Guguk Panjang yaitu sebesar 0%.

3. Cakupan Bayi Baru Lahir mendapat Iniasiasi Menyusui Dini (IMD)

Gambar 6.9 Cakupan Bayi Baru Lahir mendapat Iniasiasi Menyusui Dini (IMD) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



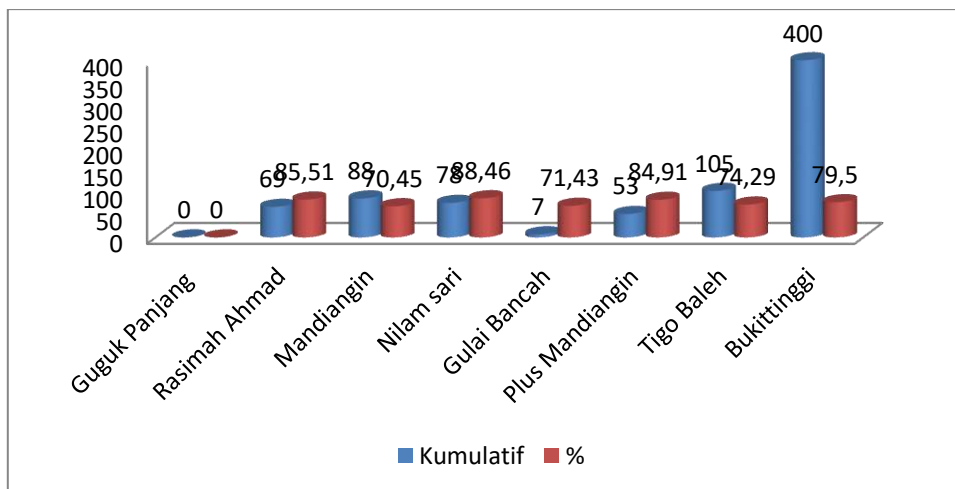
Berdasarkan grafik 6.9 diketahui bahwa Cakupan Bayi Baru Lahir mendapat Iniasiasi Menyusui Dini (IMD) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 49,56% sedangkan target nasional sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Bayi Baru Lahir mendapat Iniasiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Bukittinggi belum tercapai dan hampir semua

Puskesmas belum mencapai target kecuali Puskesmas Gulai Banchah, Tigo Baleh dan Nilam Sari.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Nilam sari yaitu 62,27% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Rasimah Ahmad yaitu sebesar 35,64%.

4. Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

Gambar 6.10 Persentase Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



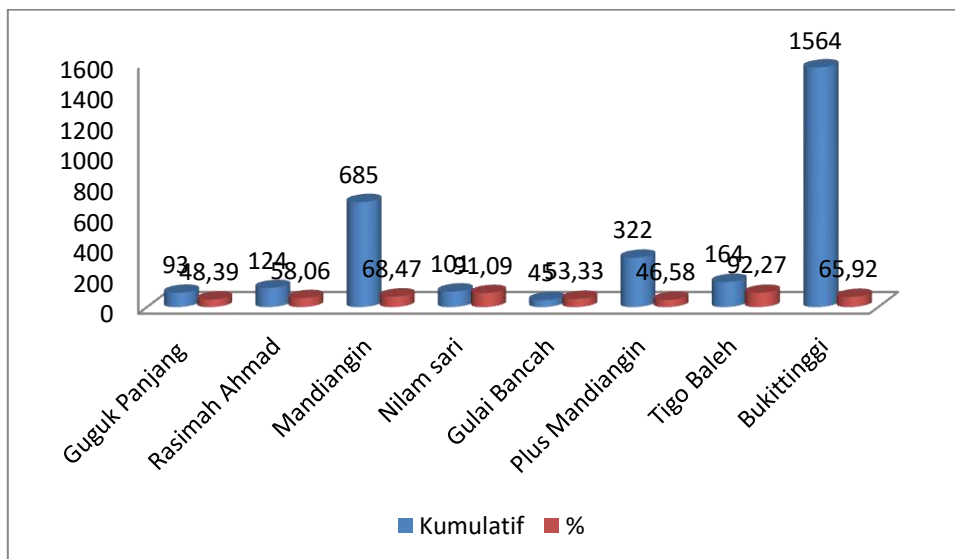
Berdasarkan grafik 6.10 diketahui bahwa Persentase Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 79,5 % sedangkan target nasional sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase cakupan bayi usia kurang dari

6 bulan mendapat ASI eksklusif di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Nilam Sari yaitu 88,46% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Guguk Panjang yaitu sebesar 0%.

5. Cakupan Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

Gambar 6.11 Persentase Cakupan Bayi Usia 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020

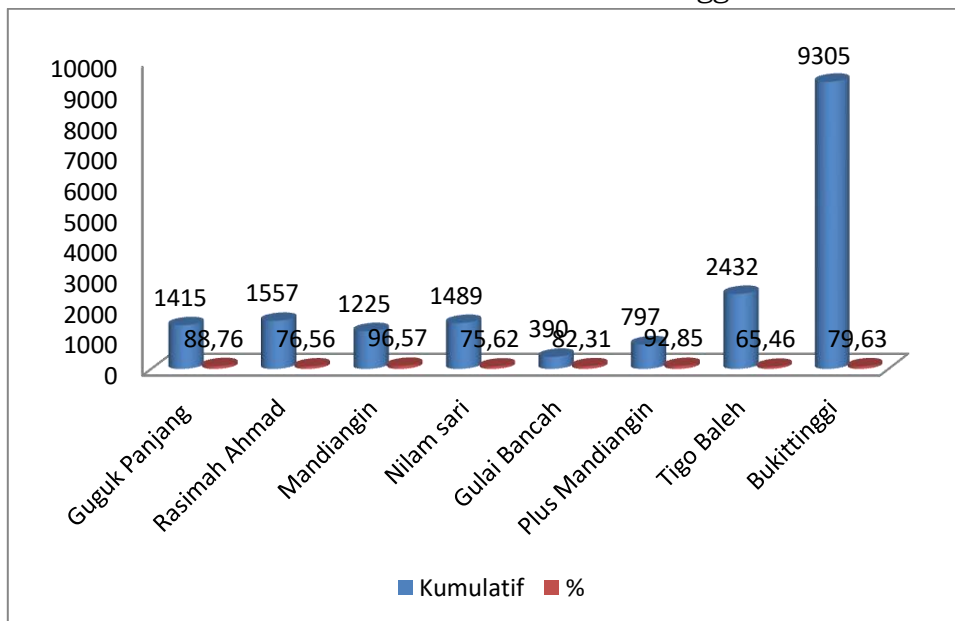


Berdasarkan grafik 6.11 diketahui bahwa persentase cakupan bayi usia 6 bulan mendapat asi eksklusif di dinas kesehatan kota bukittinggi tahun 2020 adalah 79,5 % sedangkan target nasional sebesar 35%. hal ini menunjukkan bahwa target indikator persentase cakupan bayi usia 6 bulan mendapat asi eksklusif di kota bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Tigo Baleh yaitu 92,27% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Plus Mandiangin yaitu sebesar 46,58%.

6. Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A

Gambar 6.12 Cakupan Balita 6 – 59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



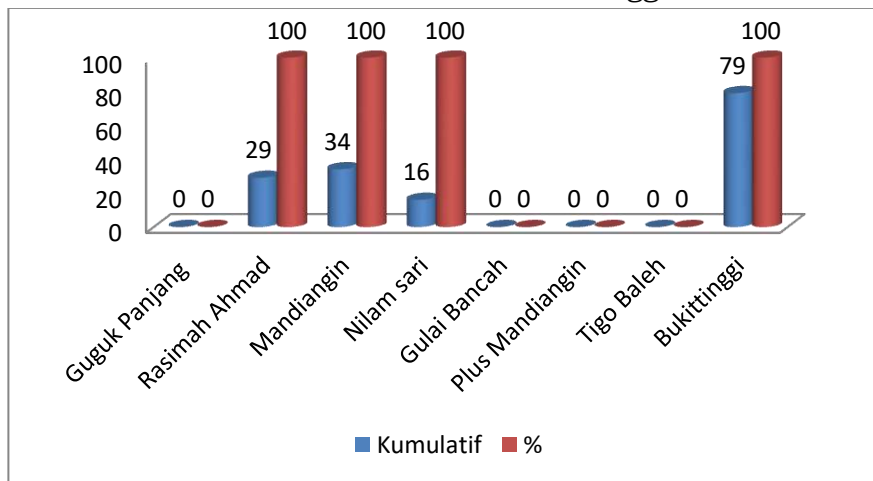
Berdasarkan grafik 6.12 diketahui bahwa Balita 6 – 59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 79,63% sedangkan target nasional sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Balita 6 – 59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A di Kota Bukittinggi belum tercapai dan hampir semua Puskesmas belum

mencapai target kecuali Puskesmas Mandiangin, dan Plus Mandiangin.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Mandiangin yaitu 96,57% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Tigo Baleh yaitu sebesar 65,46%.

7. Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan

Gambar 6.13 Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



Berdasarkan grafik 6.13 diketahui bahwa Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 100% sedangkan target nasional sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan Di di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa hampir setiap puskesmas sudah mencapai target nasional yaitu 100% kecuali Puskesmas Guguk Panjang, Gulai Bancah, Plus Mandiangin dan Tigo Baleh karena di ke 4 Puskesmas tersebut tidak terdapat kasus.

8. Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

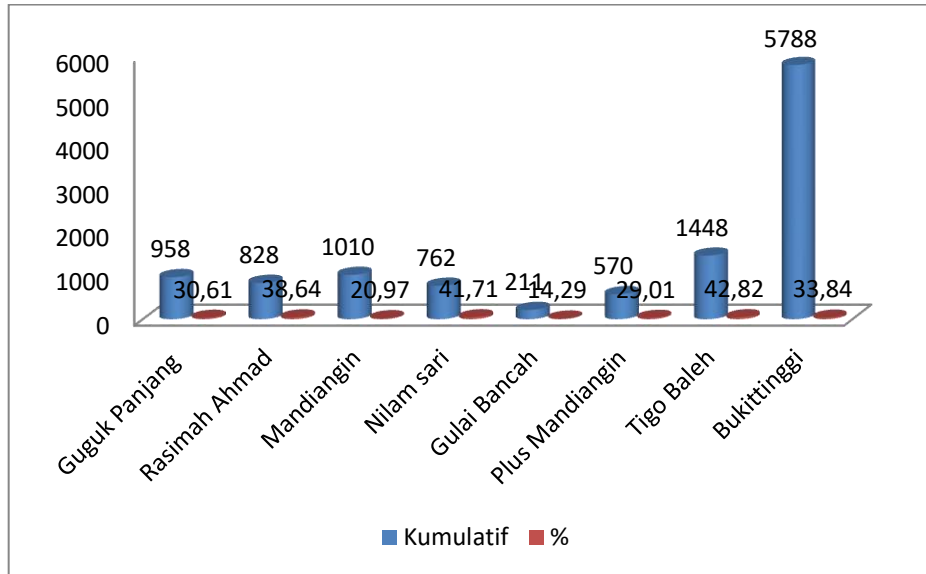
Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020 sudah terlaksana dimana setiap balita yang menderita gizi buruk dilakukan tindakan di rumah sakit setelah itu dilakukan rawat jalan dan diberikan makanan tambahan selama 90 hari.

9. Jumlah Balita yang mendapatkan Suplementasi Gizi Mikro

Suplementasi gizi mikro untuk balita di wilayah kerja Dinas kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 tidak dilakukan karena Kota Bukittinggi bukan merupakan daerah lokus stunting.

10. Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

Gambar 6.14 Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020

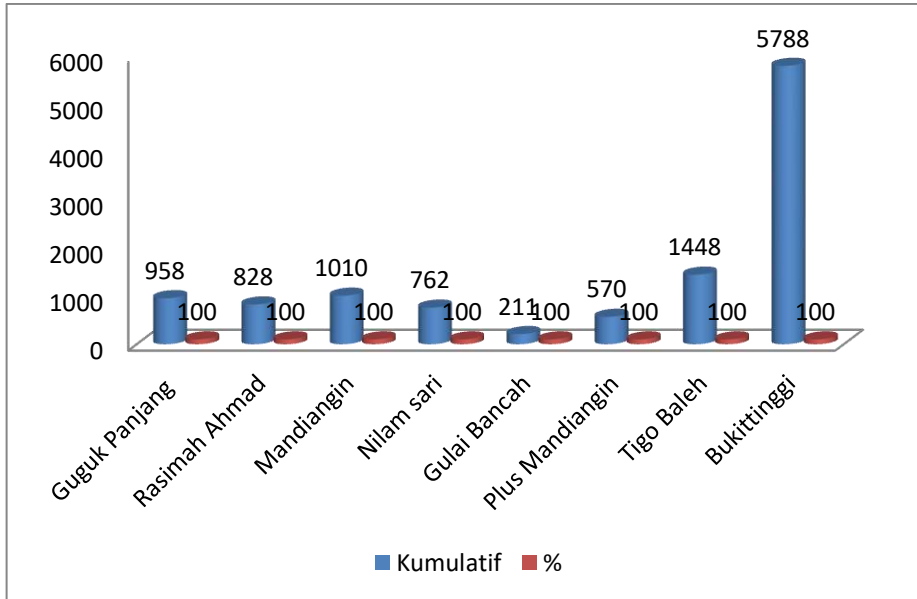


Berdasarkan grafik 6.14 diketahui bahwa Cakupan Balita yang ditimbang beratbadannya (D/S) Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 1,08% sedangkan target nasional sebesar 33,84%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Kota Bukittinggi belum tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Tigo Baleh yaitu 42,82% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Gulai Bancah yaitu sebesar 14,29%. Dapat dilihat semua Puskesmas belum mencapai target nasional.

11. Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S)

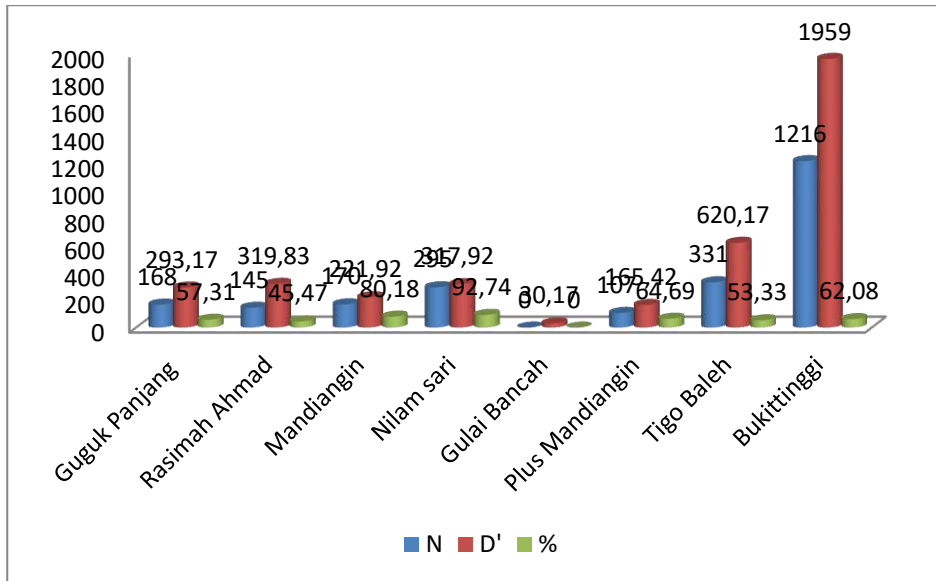
Gambar 6.15 Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



Berdasarkan grafik 6.15 diketahui bahwa Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 100% sedangkan target nasional sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S) di Kota Bukittinggi sudah tercapai. Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase di setiap Puskesmas sudah mencapai 100%.

12. Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)

Gambar 6.16 Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



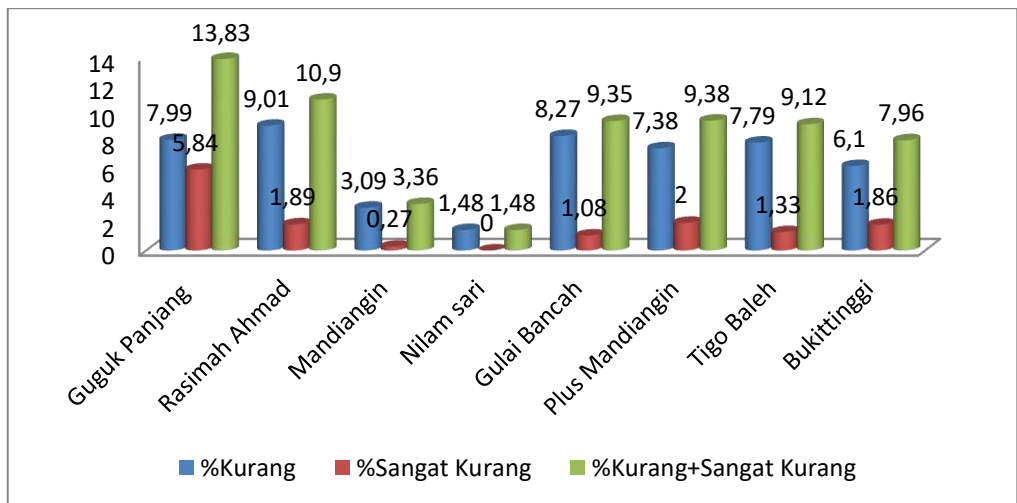
Berdasarkan grafik 6.16 diketahui bahwa Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 62,08% sedangkan target nasional sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) di Kota Bukittinggi belum tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Nilam sari yaitu 92,74% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Rasimah Ahmad yaitu sebesar 45,47 % dan belum mencapai target. Berdasarkan data selain

Puskesmas Rasimah Ahmad terdapat 3 Puskesmas lain yang belum mencapai target yaitu Puskesmas Guguk Panjang, Plus Mandiangi dan Tigo Baleh.

13. Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) pada Balita

Gambar 6.17 Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) pada Balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020



Berdasarkan grafik 6.17 diketahui bahwa Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) pada Balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 7,96% sedangkan target nasional sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) pada Balita di Kota Bukittinggi sudah tercapai.

Dilihat dari grafik diketahui bahwa persentase tertinggi berada di Puskesmas Guguk Panjang yaitu 13,83% sedangkan yang terendah berada di Puskesmas Nilam Sari yaitu sebesar 1,48 %.

14. Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi. Pasalnya, tinggi badan anak adalah salah satu faktor yang menandai stunting dan menjadi penanda apakah nutrisi anak sudah tercukupi atau belum.

Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi (SD). Penilaian status gizi yang satu ini biasanya menggunakan grafik pertumbuhan anak (GPA) dari WHO. Tubuh pendek pada anak yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi kurang gizi yang telah berlangsung dalam waktu lama.

Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat sehingga mengakibatkan dirinya tergolong stunting. Jadi singkatnya, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang sehingga memengaruhi perkembangan tinggi badannya.

Tabel 6.7 Persentase Balita Stunting menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

N O	Kecamatan	Sangat Pendek		Pendek		Stunting	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Guguk Panjang	116	5,55	276	13,02	392	18,58
2	MKS	90	3,57	268	10,625	358	14,19
3	ABTB	74	5,19	168	11,79	242	16,98
	Bukittinggi	280	4,23	712	10,76	992	14,99

Sumber Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2020 adalah 14,99% sedangkan target nasional sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kota Bukittinggi masih dibawah standar.

Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya yakni:

- Pertumbuhan melambat
- Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- Pertumbuhan gigi terlambat
- Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya
- Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
- Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
- Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarce (menstruasi pertama anak perempuan).
- Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

D. Pelayanan Kesehatan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah didefinisikan sebagai bayi lahir yang berat badannya kurang dari 2500 gram. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu mudah terkena infeksi. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah 1,08%, dimana ditemukan 21 bayi dengan berat badan lahir <2500 gram . Adapun cakupan BBLR pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.8. Cakupan BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No	Kecamatan	Jml Lahir Hidup	BBLR	%
1	Guguk Panjang	591	0	0
2	Mandiingin Koto Selayan	831	10	1,93
3	ABTB	448	11	2,41
Jumlah		1870	21	1,08

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua bayi BBLR perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

E. Status Gizi pada Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan di Kota Bukittinggi ditemukan 527 orang Balita yang underweight 7,96% Balita yang berstatus gizi sangat kurang 1,86% dan berstatus gizi kurang 6,1 %. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.9
Persentase Status Gizi berdasarkan BB /U pada Balita
di Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jml Balita	Underweight		Gizi Baik		Gizi Lebih	
		Ditimbang	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Guguk Panjang	2174	259	11,91	1731	79,62	184	8,46
2	MKS	3005	138	4,59	2725	90,68	142	4,73
3	ABTB	1439	130	9,03	1223	84,99	86	5,98
	Bukittinggi	6618	527	7,96	5679	85,81	412	6,23

Sumber Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa Balita yang berstatus gizi underweight (gizi buruk dan gizi kurang) masih ditemukan sebanyak 7,96 % .

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gizi buruk atau underweight pada anak, diantaranya disebabkan oleh terbatasnya asupan makan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak mampu menyerap zat makanan secara baik.

F. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Strata (tingkatan) Posyandu dibagi menjadi 4 macam yaitu Posyandu Pratama (warna merah), Posyandu Madya (warna kuning), Posyandu Purnama (warna hijau) dan Posyandu Mandiri (warna biru) Berikut strata Posyandu di Kota Bukittinggi pada tahun 2020.

Tabel 6.10. Jumlah tahun 2020 Posyandu menurut Strata Posyandu Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jml
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	
1	MKS	1	4	32	11	48
2	GP	1	33	18	5	57
3	ABTB	3	6	22	0	31
Jumlah		5	43	72	16	136

Sumber: Dinkes Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa semakin menurunnya strata Posyandu yang Purnama dan Mandiri , menjadi strata Pratama dan Madya dibandingkan tahun 2019. Hal ini

disebabkan pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020, sehingga jumlah buka posyandu kurang dari 10 kali per tahun.

G. Penderita HIV /AIDS

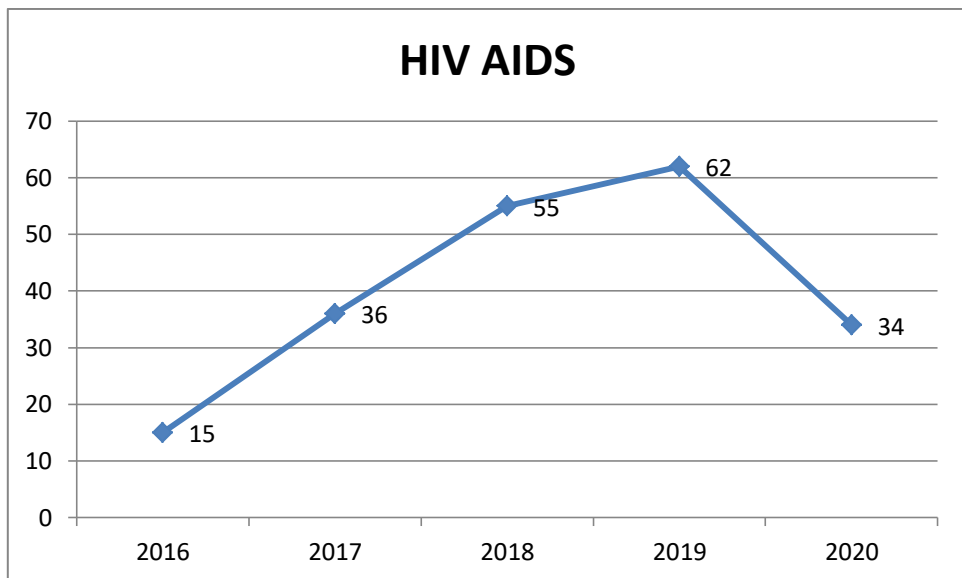
HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebaga HIV positif.

Pemetaan epidemi HIV di Indonesia dibagi menjadi lima kategori, yaitu <90 kasus, 90-206 kasus, 207-323 kasus, 324-440 kasus, dan > 440 kasus. Di Kota Bukittinggi pada tahun 2019 kasus HIV sebanyak 62 kasus yang terdiri atas 47 orang laki-laki dan 15 orang perempuan..

Menurut jenis kelamin, proporsi kasus baru HIV / AIDS di Kota Bukittinggi tahun 2018 pada kelompok laki-laki lebih besar dibandingkan persentase pada kelompok perempuan.

Data orang dengan HIV AIDS sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 6.18 Jumlah Orang dengan HIV AIDS di Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2020



Sumber : Dinkes Kota Bkt 2020

H. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dicanangkan sejak tahun 1990 an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga dari pada kuantitasnya.

Alat yang paling banyak digunakan perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun di Kota Bukittinggi adalah suntik , IUD dan Implan , sedangkan yang paling sedikit adalah MOW (Medis Operasi Wanita). Akseptor KB laki-laki masih sangat rendah yaitu 50 orang MOP dan 854 orang Kondom.

Contraceptive Prevalence Rate (CFR)

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CFR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangan menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Contraceptive Prevalence Rate (CFR) merupakan perbandingan jumlah peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur kemudian hasilnya dikali 100. Pada tahun 2020 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 11.072 orang sementara jumlah pasangan usia subur adalah 16.641 orang., maka CFR tahun 2020 adalah 66,53%

Tabel 6.11. **Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana Menurut Alat Kontrasepsi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Kec.	Alat Kontrasepsi/ Contraception Tools							Jml
		IMP	PIL	IUD	KON DOM	SUNT IK	MO W	MOP	
1	GP	490	392	108 7	287	1319	200	20	3795
2	MKS	475	468	192 1	269	1613	151	21	4918
3	ABTB	181	308	521	298	912	130	9	2359
Jumlah		1.146	1.168	3.52 9	854	3.844	481	50	11.07 2

Sumber: Dinas P3APKB Kota Bukittinggi

I. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan Pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis, disamping itu bagi usia perkawinan pertama yang masih tergolong muda akan mengakibatkan anak tidak memperoleh hak atas pendidikan, hak bermain, kehilangan masa remaja dan kehilangan masa-masa dimana mereka seharusnya bias mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam hidup.

Usia Perkawinan Pertama Hasil pendataan Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.12. Usia Perkawinan Pertama PUS Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2019.

No	Kecamatan	PUS	ISTRI				SUAMI			
			<21 TAHUN		≥21 TAHUN		<25 TAHUN		≥25 TAHUN	
			JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1	G. Panjang	4.804	1065	22,2	3739	77,8	1126	23,4	3678	76,6
2	MKS	6.474	1319	20,4	5155	79,6	1385	21,4	5089	78,6
3	ABTB	3.444	543	15,8	2901	84,2	656	19,0	2788	81,0
Jumlah		14.722	2927	19,9	11795	80,1	3167	21,5	11555	78,5

Sumber: DP3APPKB Kota Bukittinggi tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 19,9 % perempuan yang menikah diusia muda kurang dari 21 tahun dan

21,5 % laki-laki menikah diusia kurang dari 25 tahun. Terlihat bahwa perkawinan pertama di Kota Bukittinggi sebagian besar adalah pada usia lebih dari 21 tahun pada perempuan dan lebih dan sama 25 tahun.pada laki-laki.

J. Penggunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut data yang dilaporkan oleh Polres Bukittinggi, dilaporkan jumlah kriminal Narkotika diterima 70 kasus, dan diputuskan sebanyak 60 kasus.

K .Kota Layak Anak (KLA)

Kota layak anak adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana , menyeluruh, dan berkelanjutan yang diukur melalui 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan kategori :

- Pratama;
- Madya

- Nindya:
- Utama dan;
- Kota Layak Anak (KLA)

Capaian Kota Layak Anak pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2018 masih pada tahap dasar yaitu Pratama dan tahun 2019 perolehan penghargaan naik setingkat menjadi kategori Madya, artinya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sudah terakomodir sebanyak 62%.

**Tabel 6.13 Capaian Kota layak Anak Kota Bukittinggi
Tahun 2016-2020**

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian KLA	Pratama	Pratama	Madya	Tidak Ada Penilaian	Madya

Sumber: DP3APPKB, 2021

BAB VII

EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan tenaga kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, baik yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia 15 tahun ke

atas. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Tabel 7.1. Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Lak-laki	Perempuan	LK +PR
I	Angkatan Kerja			
	1. Bekerja	35.285	29.631	64.916
	2. Pengangguran	3.250	2.024	5.274
II	Bukan Angkatan Kerja			0
	1. Sekolah	4.784	6.765	11.549
	2. Mengurus rumah tangga	2.290	12.679	14.969
	3. Lainnya	2.584	1.212	3.796
	Jumlah	48.193	52.311	100.504
III.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%)	79,96	60,51	69,84
IV	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,74	3,87	5,25

Sumber: BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021, Hasil Sarkernas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sebanyak 69,84, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 65,02 %. Hal ini berarti sebanyak 69 dari 100 orang penduduk usia kerja termasuk dalam angkatan

kerja. Terbagi menjadi 2 golongan yaitu penduduk yang bekerja sebanyak 64.916 orang dan pengangguran 5.274 orang.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja laki- laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu laki-laki 79,96% berbanding 60,51% perempuan. Sebaliknya perempuan yang bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu perempuan 52.311 orang berbanding dengan laki-laki sebanyak 48 193 orang

Banyaknya perempuan yang tidak termasuk angkatan kerja disebabkan perempuan yang berstatus ibu rumah tangga yaitu sebanyak 12.679 orang dan sekolah 11.549 orang.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan yang tidak mencari pekerjaan atau tidak mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja biasanya tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kemiskinan dan kerawanan sosial yang ditimbulkannya.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase antara pengangguran laki-laki dan perempuan. Pengangguran pada laki-laki sebanyak 6,74 % sedangkan pengangguran pada wanita adalah 3,87% Rendahnya persentase pengangguran perempuan hampir separo dari laki-laki mengindikasikan bahwa keterlibatan

perempuan di Kota Bukittinggi dalam ketenagakerjaan sudah cukup tinggi.

C. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Indikator status pekerjaan terdiri dari enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.

Status pekerjaan utama penduduk Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini :

Tabel. 7.2 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Berusaha sendiri.	6.889	5.549	12.438
2	Berusaha dibantu buruh tdk tetap/ buruh tak dibayar.	5.216	3697	8.913
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar.	3.514	985	4.499
4	Buruh/karyawan/ pegawai.	14.900	12590	27.490
5	Pekerja bebas	1.454	655	2.109
6	Pekerja keluarga/ ta dibayar	3.312	6.155	9.467
	Total	35.285	29.631	64.916

Sumber: Sakernas BPS Kota Bukittinggi 2020

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Tabel 6.2, penduduk perempuan Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai,

yaitu 12.590 (42,49 persen).Sedangkan sebagai pekerja keluarga merupakan posisi kedua yaitu 20,77 persen. Sedangkan status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya sebagai pekerja bebas adalah persentase terkecil yaitu sebesar 2,2 persen.

D. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020 terdapat garis kemiskinan sebesar 519.470 , sedangkan jumlah penduduk miskin adalah 6010 jiwa atau 4,54 % penduduk Bukittinggi yang berada dibawah garis kemiskinan. (Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional)

E. Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja di Kota Bukittinggi Th, 2020.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk bekerja di Kota Bukittinggi Tahun 2020, mayoritas adalah SMA, sebagaimana terlihat pada dibawah ini.

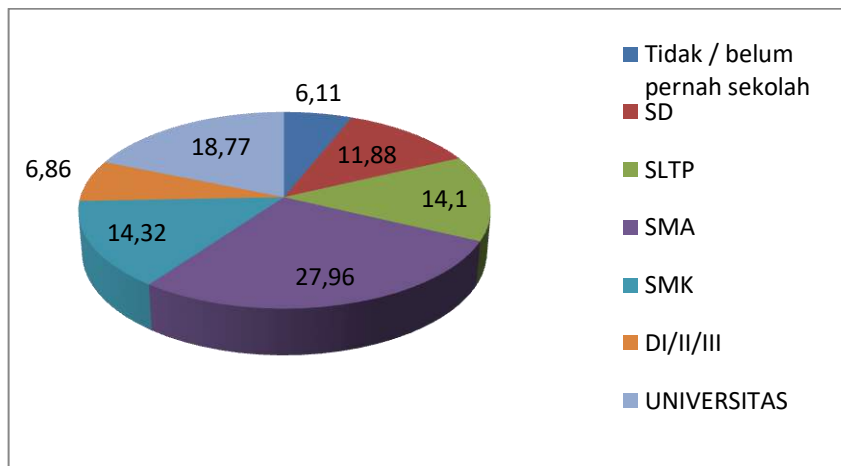
Tabel 7.3 Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan dan Jenis Kegiatan selama seminggu yang lalu di Kota Bukittinggi Tahun 2020

Kegiatan Utama	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
Tidak / Belum pernah sekolah	46		46	-
Tidak/ belum tamat SD	3.008		3008	1955
Sekolah Dasar	4.968	158	5.126	3024
SMP	11983	397	12.380	9.378
SMA	15.809	1607	17.416	8.988

SMA Kejuruan	12.328	1319	13.647	3218
Diploma I/II/III/Akademi	4866	473	5.339	2130
Universitas	11908	1320	13.228	1621
Jumlah	64916	5274	70.190	30.314

Sumber : BPS / Sakernas 2020

Gambar 7.1 Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.



Sumber: BPS Tahun 2021

F. Lapangan Usaha

Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha yang terbesar di Kota Bukittinggi adalah pada perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 7.4. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja di Kegiatan Informal menurut Pekerjaan utama di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.	923	363	1286
2	Pertambangan dan penggalan	198	-	198
3	Industri/ pengolahan.	3388	4524	7912
4	Listrik, Gas dan air	427	240	667
5	Bangunan	1791	177	1968
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.	1733	13991	31324
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3244	931	4175
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan bangunan, Tanah dan jasa perusahaan	1555	870	2425
9	Jasa Kemasyarakatan, social dan perorangan.	6426	8535	14961
Jumlah		35285	29631	64916

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Hasil Sakernas 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang terbanyak baik laki-laki maupun perempuan banyak pada lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan jasa.

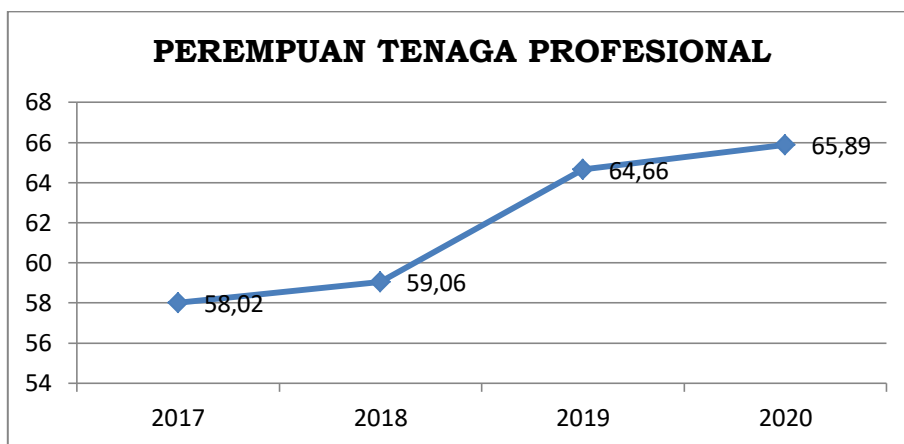
G. Perempuan sebagai Tenaga Kerja Profesional

Profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata.

Orang disebut profesional jika memiliki tolak ukur perilaku di atas rata-rata manusia pada umumnya. Umumnya, seorang profesional mempunyai tantangan serta tuntutan yang cukup berat. Akan tetapi, ia memiliki citra atau pola perilaku yang baik karena apa yang dilakukan adalah dalam rangka kepentingan masyarakat itu sendiri.

Profesional diharapkan di dalam semua bidang. Karena perumpamaannya adalah jika di dalam kehidupan ini setiap orang melakukan tugas dengan standar profesional tinggi, maka itu akan dapat memperbaiki kualitas masyarakat itu sendiri. Sehingga, profesional dari setiap orang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 7.2 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai dengan 2020



Sumber : BPS Sumatera Barat 2020

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase perempuan sebagai tenaga profesional tahun 2020 adalah 65,89 persen.

H. Usaha Mikro dan Kecil (UKM)

Bukittinggi sebagai Kota wisata sangat besar pengaruhnya kepada roda perekonomian di Kota Bukittinggi, sehingga bermunculan usaha-usaha perekonomian masyarakat berupa Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang terdiri dari sentra-sentra industri.

Tabel 7.5 Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Kec	Kecil	Menengah	Mikro	Jumlah
1.	ABTB	162	8	1343	1.513
2.	GP	315	19	2091	2.425
3.	MKS	175	4	3337	3.516
Jumlah		652	31	6.771	7.454

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Tabel 7.5 di atas menggambarkan bahwa UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Bukittinggi adalah usaha mikro.

Usaha mikro ini tersebar sebagian besar di Kecamatan Guguk Panjang dan lebih banyak dikelola oleh perempuan seperti terlihat pada tabel 7.6 berikut.

Tabel 7.6. Data Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Kecil			Menengah			Mikro		
		L	P	L + P	L	P	L+P	L	P	L + P
1	ABTB	271	219	490	13	4	17	1.362	1650	3.012
2	GP	404	297	701	38	17	55	1.196	1.570	2.766
3	MKS	253	241	494	6	42	48	908	1.043	1.951
Jumlah		928	757	1685	57	63	120	3466	4.263	7.729

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tenaga kerja pada usaha kecil lebih banyak dikelola oleh laki-laki dibandingkan dengan tenaga perempuan, sedangkan untuk usaha menengah dan usaha mikro lebih banyak berperan perempuan dari pada laki-laki.

Data sentra industri yang ada di Kota Bukittinggi, pada umumnya bergerak pada industri pangan, sandang, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Jenis industri pangan terbanyak adalah usaha kue basah, kerupuk dan sejenisnya. Dan usaha ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan jumlah industri di bidang sandang lebih banyak mengelola pakaian jadi dari tekstil dan juga banyak menyerap tenaga kerja, Jenis industri lain yang banyak di Kota Bukittinggi yaitu kerajinan khususnya bordir dan sulaman yang tenaga kerjanya pada umumnya adalah perempuan.

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar

belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai negeri Sipil, Koperasi Simpan Pinjam dan lain-lain.

Tabel 7.7 Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jml Koperasi			Anggota		
		Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	L	P	L + P
1	MKS	12	4	16	817	890	1.707
2	ABTB	19	7	26	2.360	1.930	4.290
3	GP	41	12	53	4.362	4.742	9.104
Jumlah		72	23	95	7.539	7.562	15.101

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan untuk ikut sebagai anggota koperasi cukup tinggi, ini berarti minat dari kaum perempuan cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan kaum perempuan dan keluarganya serta masyarakat/organisasinya. Diharapkan peningkatan kesejahteraan ini mampu menciptakan perempuan yang maju dan lebih berdaya.

Kota Bukittinggi memiliki 95 koperasi pada 3 kecamatan, dan sudah bisa menyerap tenaga kerja/karyawan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.8. Partisipasi Perempuan sebagai Pengurus Koperasi Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kec	Aktif	Tdk Aktif	Jml Kop	Manager			Karyawan		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	MKS	12	4	16	1	0	1	20	11	31
2	ABTB	19	7	26	0	1	1	22	43	65
3	GP	41	12	53				26	67	93
Jumlah		72	5	23	1	1	2	68	121	189

Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Data di atas memperlihatkan bahwa baik manager maupun karyawan yang menjadi pengurus koperasi sudah diduduki oleh kaum perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan sudah dapat dipercaya sebagai tenaga yang dianggap mampu mengelola koperasi dikarenakan oleh ketelitian atau keahliannya.

I. Kepala Keluarga Miskin

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena akan berdampak langsung terhadap permasalahan ekonomi, sosial dan keamanan.

Tabel 7.9. Persentase Kepala Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jml Keluarga Miskin	%
1	GP	8.031	201	2,5
2.	MKS	10.481	279	2,66
3.	ABTB	4.906	111	2,26
Jumlah		23.418	591	2,52

Sumber: Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kota Bukittinggi Tahun 2020

J. Pekerja pada Instansi Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Tabel 7.10. Tenaga Kerja di Lembaga/BUMN/BUMD/Instansi Vertikal

No	Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja		JUMLAH
		L	P	
1	Kantor Pos	23	14	37
2	Bank Nagari	68	52	120
3	BRI	101	79	180
4	BNI	41	72	113
5	BTN	12	6	18
6	Kemenag	61	51	112
7	BPS	7	17	24
8	PDAM		18	
9	Bulog		7	
10	Pengadilan Agama	20	14	34
Jumlah		333	305	638

Sumber: Instansi Vertikal/Lembaga Tahun 2018.

Tabel 7.11. Tenaga Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Tahun 2020 di Kota Bukittinggi.

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	REKTOR / DEKAN		DOSEN		KARYAWAN/ TENAGA PENDIDIK	
		L	P	L	P	L	P
1	UNP PGSD			15	29	6	6
2	AMIK BUKITTINGGI			6	10	5	6
3	UNIVERSITAS MHD. NATSIR	1		4	11	4	2
4	FAK. HUKUM MUHAMMADIYAH SUMBAR	1	1	23	10	7	5
5	POLTEKES PRODI KEBIDANAN	0	0	2	13	2	9
6	POLTEKES PRODI KESEHATAN GIGI	0	0	6	12	17	5

7	STIKES PRIMA NUSANTARA	3	6	3	8	8	4
8	STIKES YARSI	0	0	4	29	10	10
9	STIKES FORT DE KOCK	2	9	10	58	7	8
10	STIKES PERINTIS	3	9	5	15	14	19
11	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	0	0	5	21	1	5
12	AKBID PELITA ANDALAS	0	4	1	6	1	3
13	AKFAR DWI FARMA	0	0	4	7	11	11
14	AKFAR YAYASAN IMAM BONJOL (YIB)	1	3	2	4	1	4
JUMLAH		11	32	90	233	94	97

Tabel 7.12. Jumlah Tenaga Kesehatan (Medis) di Kota Bukittinggi Tahun 2019.

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dokter Spesialis	76	57	133
2.	Dokter umum	36	76	112
3.	Dokter gigi	6	30	36
4.	Bidan	0	263	263
5.	Perawat	152	811	963
6.	Perawat gigi	7	38	45
7.	Tenaga Teknis kefarmasian	20	147	167
8.	Apoteker	13	49	62
9.	Kesehatan Masyarakat	27	49	76
10.	Kesehatan Lingkungan	5	7	12
11.	Nutrisisionis	4	36	40
12.	Dietision	0	5	5
13.	Keterapian Fisik	18	23	41
14.	Keteknisian Medis	68	129	197
15.	Tenaga Kesehatan Lain	11	99	110
JUMLAH		443	1.819	2.262

BAB VIII

BIDANG POLITIK DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Keterlibatan perempuan dalam politik, merupakan sebuah keharusan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara politis. Dikuatirkan rendahnya keterlibatan perempuan di partai politik dan parlemen, berdampak langsung pada kecilnya alokasi perhatian terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan, karena kebijakan-kebijakan dibuat tidak berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan hanya diposisikan sebagai objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraannya terabaikan.

Akhirnya yang terjadi adalah, perempuan selalu berada pada posisi yang marjinal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya dilihat dari sistem pengupahan, upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki, jaminan kesehatan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, kebijakan-kebijakan moralitas lebih berpihak pada laki-laki dan sebagainya. Minimnya keterlibatan dan partisipasi politik perempuan ini, menjadi penyumbang terhadap termarjinalnya perempuan dalam pembangunan.

Oleh sebab itulah negara-negara penanda tangan konvensi CEDAW PBB di desak untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia salah satunya lahirlah gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat difahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan

pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut. *Affirmative action* ini berlaku setelah pemerintahan reformasi di Indonesia.

Bentuk dari *affirmative action* itu diantaranya adalah, *pertama* mengaruskan pada semua partai politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU No 12/2003. *Kedua* mengajukan prinsip keterwakilan perempuan dimana masing-masing partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Prinsip keterwakilan ini lebih dikenal dengan prinsip kuota 30% keterwakilan perempuan.

A. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan di daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai kebijakan yang sangat strategis dalam bidang politik, budaya, pembangun, ekonomi dan kesejahteraan. Untuk itu, sangat diperlukan keberimbangan anggota DPRD tersebut, sehingga terwujud ada kebijakan yang berimbang antara kepentingan kesejahteraan laki-laki dan perempuan.

Di kota Bukittinggi, kiprah perempuan dalam politik pertama-tama dapat dilihat dari komposisi perempuan dalam bidang politik. Data menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam bidang politik, hanya saja apabila dibandingkan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan jauh lebih rendah, hanya 2 orang (8%) perempuan yang duduk di legislatif dibandingkan laki-laki 23 orang (92%).

Tabel 8.1. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Partai dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	PARTAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	GERINDRA	5	0	5
2	PKS	5	0	5
3	DEMOKRAT	4	0	4
4	GOLKAR	3	0	3
5	PAN	1	2	3
6	PPP	2	0	2
7	NASDEM	2	0	2
8	PKB	1	0	1
TOTAL		23	2	25

Sumber: Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Angka ini masih jauh dari yang dicita-citakan, yakni 30% menurut Undang-undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD.

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kemauan perempuan untuk terlibat dalam politik atau belum munculnya kesadaran perempuan dalam berpolitik. Padahal undang-undang sudah memberikan peluang yang sangat besar agar perempuan mempunyai keterlibatan dalam berpolitik.

Keberadaan perempuan di DPRD akan terlihat peranannya di komisi yang ada. Misalnya tugas Komisi A terkait dengan pemerintahan yang meliputi pemerintahan kelurahan dan nagari, ketertiban, keamanan, penerangan, pers, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, aparatur dan ketenaga kerjaan, perizinan, sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pertanahan, kependudukan, agama dan sosial budaya.

Komisi B mempunyai tugas di bidang perekonomian, keuangan dan kesejahteraan, meliputi perdagangan dari dalam dan luar negeri, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal, pengelolaan pasar, kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, ilmu dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Komisi C bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pertambangan dan energi, perencanaan pembangunan.

Pada masing-masing tiga komisi tersebut mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda, termasuk juga perbedaan-perbedaan jumlah perempuan dalam masing-masing komisi tersebut. Bahkan khusus di Komisi C tidak ada anggota perempuan dalam komisi tersebut. Tentang jumlah sebaran anggota DPRD di masing-masing Komisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.2. Jumlah Anggota DPRD Kota Bukittinggi menurut Komisi dan Jenis Kelamin, Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	KOMISI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	I	7	1	8
2	II	7	0	7
3	III	6	1	7
4	Pada masing-masing komisi, pimpinan DPRD (Ketua dan wakil ketua sbg Koordinator	3	0	3
	TOTAL	23	2	25

Sumber: Setwan Kota Bukittinggi Tahun 2020.

B. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Eksekutif

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu urat nadi dalam organisasi pemerintahan, karena PNS sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, jumlah PNS yang tersedia secara lengkap dan profesional merupakan salah satu hal yang sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berkualitas dan baik. PNS juga berperan sebagai pelayan daripada masyarakat, oleh sebab itu jumlahnya juga sangat menentukan terhadap kualitas layanan tersebut. Saat ini, di kota Bukittinggi terdapat sebanyak 2603 orang PNS yang akan melayani 121.028 penduduk kota Bukittinggi.

Dari 2603 jumlah PNS yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 1.627 perempuan atau 62,5 % dan 976 orang laki-laki atau 37,5

%. Dengan demikian PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan PNS laki-laki di kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari jenis pendidikan terdapat pendidikan terbanyak adalah sarjana S1 (54,3%) dan S2 sebanyak 7,6%. Jumlah PNS Kota Bukittinggi menurut pendidikan dan jenis kelamin ini dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	PENDIDIKAN	LAK-LAKI	PEREMP UAN	JUMLAH
1	Sampai dengan SD	63	2	65
2	SLTP / Sederajat	27	2	29
3	SLTA / Sederajat	261	132	393
4	Diploma I,II/Akta I,II	11	30	41
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	54	255	309
6	Tingkat Sarjana/Doktor	560	1206	1766
TOTAL		976	1627	2603

Sumber: (BKPSDM) Kota Bukittinggi Tahun 2021

Selanjutnya, jika dilihat lebih rinci jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kota Bukittinggi maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya PNS perempuan bergolongan I dan II jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, di golongan III dan IV, PNS perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.4. Jumlah PNS menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	75	4	79
2	II	247	118	365
3	III	489	1144	1633
4	IV	165	361	526
Total		976	1627	2603

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021

2. Perempuan Menduduki Jabatan Eselon

Pada tahun 2020 PNS yang menduduki jabatan eselon di Kota Bukittinggi berjumlah 551 orang. Dari jumlah tersebut hanya 3 orang yang menduduki eselon II sebagai pengambil kebijakan, dimana laki-laki lebih dominan yaitu 22 orang, padahal jumlah perempuan menjadi PNS di Kota Bukittinggi lebih banyak dari pada laki-laki. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.5. Jumlah PNS menurut Esselon dan Jenis Kelamin di Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO.	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II	22	3	25
2	III	56	44	100
3	IV	175	251	426
Total		253	298	551

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021.

3. Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin

Pada tabel 7.6. di bawah terlihat bahwa PNS yang menduduki jabatan Fungsional lebih didominasi oleh perempuan yang tersebar sebagai tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, PLKB dan lain-lain.

Tabel 8.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.

No.	Jenis PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS Struktural	253	298	551
2	PNS Fungsional Tertentu	171	771	942
3	PNS Fungsional Umum	552	558	1110
Total		976	1627	2603

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021

4. Camat

Di Kota Bukittinggi terdapat tiga kecamatan, yakni kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh. Masing-masing kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat. Untuk ketiga kecamatan tersebut camatnya laki-laki dan bahkan belum pernah ada perempuan.

Pada tingkat kecamatan, masyarakat belum pernah dipimpin oleh seorang camat perempuan. Jika dilihat pada masing-masing kecamatan itu perempuan selalu lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki.

Tabel 8.7. Jumlah Camat di Kota Bukittinggi Tahun 2020

NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	Guguk Panjang	1	0	1
2	Mandiingin Koto Selayan	1	0	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	1	0	1
	JUMLAH	3	0	3

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021

5. Jumlah Lurah di Kota Bukittinggi

Di Kota Bukittinggi terdapat 24 kelurahan dari tiga kecamatan. Di kota Bukittinggi hanya ada lurah dan tidak ada nagari, namun sampai tahun 2020 hanya 4 lurah yang perempuan. Dari data diatas tergambar bahwa pada tingkat kepemimpinan terendah (Kelurahan) di Kota Bukittinggi masih di dominasi oleh laki-laki yaitu 88% atau 21 orang. Tapi dari data 31 Desember 2020 terdapat 2 orang lurah yang memasuki usia pensiun (laki-laki).Sebagaimana datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8. Jumlah Lurah menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Guguk Panjang	6	1	7
2	Mandiingin Koto Selayan	7	1	8
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5	2	7
	JUMLAH	18	4	22

Sumber : BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan strategis sampai pada kelurahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh laki-laki.

Selain dari lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, juga terdapat PNS yang dari jalur vertikal, seperti dari Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, adapun PNS dari Kantor Kementerian Agama tersebut adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 8.9. Jumlah Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.

NO	INSTANSI	PNS			NON PNS		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	KANKEMENAG	60	47	107	2	1	3
2	MADRASAH	-	-	0	-	-	0
	- RA	-	1	1	-	23	23
	- MI	3	21	24	6	24	30
	- MTs	25	89	114	30	65	95
	- MA	37	81	118	40	51	91
3	PENYULUH AGAMA	7	6	13	14	10	24
4	DA'I	68	15	83	79	12	91
5	TPA	-	-	0			
6	MDTA			0			
JUMLAH							

Sumber : Kantor Kemenag Kota Bukittinggi Tahun 2020

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi secara keseluruhan, tenaga pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, akan tetapi keberadaan perempuan adalah yang bekerja sebagai tenaga pengajar di madrasah atau di pendidikan. Sedangkan untuk tenaga da'i, penyuluh agama masih didominasi oleh laki-laki pada Pegawai Negeri Sipil.. Data ini menggambarkan pada pegawai non PNS sudah terlihat presentase yang lebih pada penyuluh agama, dai,TPA dan MDTA. Tenaga penyuluh agama serta da'i perempuan perlu ada , sehingga persoalan yang erat kaitannya dengan

perempuan lebih dapat disampaikan secara lugas sesuai dengan kodratnya.

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di Lembaga Yudikatif dapat dilihat pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

1. Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Salah satu lembaga yudikatif adalah kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan di Kejaksaan seperti pada tabel 7.10 berikut:

Tabel 8.10. Data Ketenagaan pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

No	Jabatan	Tahun 2020	
		Lk	Pr
1.	Kepala Kejaksaan Negeri	1	
2.	Kepala Sub Bag Pembinaan		1
3.	Kepala Seksi Inteligen	1	
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	1	
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	1	
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	1	
7.	Kepala Urusan Kepegawaian		1
8.	Kepala Urusan Keuangan		1
9	Kepala Urusan Data Statistik dan Kriminologi	1	

Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2021.

2. Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 8.11. Data Hakim menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2020

NO	JABATAN	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	KETUA	1	0	1
2	WAKIL KETUA	1	0	1
3	HAKIM	2	2	4
4	PANITERA	1	0	1
5	SEKRETARIS	0	1	1
6	WAKIL PANITERA	1	0	1
7	PANITERA MUDA	2	1	3
8	KEPALA SUB BAGIAN	2	1	3
9	PANITERA PENGGANTI	3	5	8
10	JURU SITA	1	1	2
11	JURU SITA PENGGANTI	1	2	3
12	STAF	1	1	2
	JUMLAH	16	14	30

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel 8.11. di atas menunjukkan bahwa Hakim yang ada di Kota Bukittinggi jumlah laki-laki dan perempuan sama.

3. POLRI Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 8.12. Data Kepolisian menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	JENIS KEPANGKATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	1		1
2	Komisaris Polisi	4		4
3	Ajun Komisaris Polisi	13		13
4	Inspektur Satu Polisi	25	3	28
5	Inspektur dua Polisi	60	4	64
6	AIPTU	64	1	65
7	AIPDA	88	5	93
8	BRIPKA	94	10	104
9	BRIGADIR	58	2	60
10	BRIPTU	22	10	32
11	BRIPDA	20	2	22
	JUMLAH	449	37	486

Sumber: Sunda Polresta Kota Bukittinggi.

Bila dilihat dari data di atas tergambar bahwa perempuan masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender terhadap penegak hukum masih relative rendah. Oleh karena itu tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena kepengurusannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Pengurus Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

1. Data Organisasi Sosial, Kemasyarakatan dan Politik

Maraknya organisasi-organisasi perempuan, organisasi sosial, kemasyarakatan dan forum-forum yang beranggotakan perempuan merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut, apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan lebih eksis dan lebih optimal.

Tabel 8.13. Data Organisasi Mitra Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat
1	Dharmawanita	Ny. Is Yuen Karnova	Jl. Sudirman No 27-29
2	Adhyaksa Dharmakarini	Ny. Novia Sukardi	Kantor Kejaksaan
3	Dharmayukti Karini.	Ny. Tuti Sofyan	Kantor Pengadilan Negeri
4	Bhayangkari	Ny. Ama Dody	Polres Kota Bukittinggi
5	Persit Chandra	Ny. Hizrah Brozti	Kodim 0304

	Kirana	Dadi	
6	Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Emmalinda Chaidir	Jl. Sudirman Birugo.
7	Perwira	Tuti Suryani Sofyan,SH	Jl.Guru Hamzah No 1 Tarok Dipo
8	Forum Bundo Kota Bukittinggi.	Ny. Elfianis	Kel. Puhun Tembok.
9	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi.	Ny. Yesi Endriani Ramlan Nurmatias.	Jl. Perwira Belakang Balok.
10	Bundo Kandung (BK)	Ny. Efni, S.Pd	Jirek, Kel. Puhun Pintu Kabun.
11	Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi.	Ny. Zulzetri, M.Pd	Pulai, Kel. Pulai Anak Air.
12	Pusat Kajian Wanita (PKW) Kota Bukittinggi.	DR. Silvia Hanani	IAIN Kubang Putih.
13	Ikatan Isteri Pegawai Bank Daerah (ISBANDA) Kota Bukittinggi.	Ny.Yanti Tasman	Bank Nagari
14	Ikatan Isteri Pegawai Bank Rakyat Indonesia (IWABRI) Kota Bukittinggi.	Ny. Hari Prasetyo	BRI Cabang Bukittinggi
15	Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IID) Kota Bukittinggi.	Lelliwati	Gurun Aur 248 Kubang Putih.
16	Perempuan Wanita Islam	Dr.Rahmi Yetti,SpA	Jl.Pemuda No 06
17	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bukittinggi	Paulina, S.ST	Tengah Jua
18	Salimah	Selvika Wijaya,SE	Jl. Haji Miskin
19	Aisyiah	Hj.Ermiati	Jl.Perintis Kemerdekaan No 28
20	Badan Penyantun	Dr.Hj.Rahmi Yetti,	RSI Ibnu Sina

	Yarsi Sumbar perwakilan Bukittinggi	SpA	Bukittinggi
21	IWAPI	Hj.Arifah Inas	Jl.Perwira No 1
22	Muslimah NU	Misra Elvi	
23	WHBT	Lana Stiawati, SE,MBA	Jl.Jenderal A Yani

2. Pengurus Harian Partai Politik

Di dalam kepengurusan harian partai politik, perempuan sudah mulai terlihat berperan, walaupun jumlahnya masih di bawah laki-laki.

Tabel 8.14. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No	Parpol	No. SK/ Tanggal	Laki-laki	Perempuan	Jml
1	PPP	05/SK/DPW/C/XII/2016, 1 Desember 2016	27	14	41
2	Golkar	005/4/GKSD/VIII/2016 22 Agustus 2016	42	22	64
3	Gerindra	09-0143/Kpts/DPP GERINDRA/2012, 1 September 2012	36	19	55
4	Nasdem	589-SK/DPP-NASDEM/XI/2013	53	38	91
5	PDIP	24.05/KPTS/DPC/DPP/III/2015 7 Maret 2015	9	7	16
6	Demokrat	/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2012	14	7	21
7	Hanura	SKEP/025/DPDSB/ HANURA/VIII/2016, 19 Agustus 2016	13	9	22
8	PKS	074/D/SKEP/AC00-PKS/1432, 2 Mei 2016	5	1	6
Jumlah			199	117	316

3. Kaukus Perempuan Politik

SK. KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) dengan Nomor SK. Walikota Bukittinggi Nomor 476/671/DP3APPKB/VII-18 tanggal Juli 2018, tentang Pembentukan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2018-2022.

4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta penunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta diklat jabatan. Oleh sebab itu eksistensinya sangat penting dalam suatu pemerintahan dan institusi.

Pemerintahan Kota Bukittinggi sampai Agustus 2018 hanya ada 6 (enam) orang Badan Pertimbangan Jabatan ini. Dari enam orang itu semuanya adalah laki-laki. Tidak satu pun perempuan. Pada hal, jika dilihat dari jumlah PNS yang ada di lingkungan pemerintahan kota Bukittinggi perempuan merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan PNS laki-laki.

Tabel 8.15. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bukittinggi menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Sekretaris Daerah	1	0	1
2	Asisten I	1	0	1
3	Asisten II	1	0	1
4	Asisten III	1	0	1
5	Kepala BKPSDM	0	1	1
6	Kepala Inspektorat	1	0	1
	Jumlah	5	1	6

Sumber: BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2020

BAB IX

BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Semua orang sama didepan hukum dan hukum harus ditaati bukan untuk dilanggar. Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Karena Konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap deskriminasi, dan bahkan terhadap deskriminasi itu sendiri.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

terhadap perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

A. Kasus Kriminalitas yang ditangani

Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020 adalah sebagai berikut ;

Tabel 9.1 Jumlah Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2020

Kasus	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pencurian	48	2	50
Asusila	8	0	8
Pembunuhan	1	0	1
Narkoba	56		56
Penganiayaan	23		23
Lainnya	23	3	26
Total	159	5	164

Sumber : Kejaksaan Negeri Bukittinggi Tahun 2021

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kasus kriminal yang ditangani kejaksaan pada umumnya adalah laki-laki, dan terdapat 5 kasus yang ditangani perempuan.

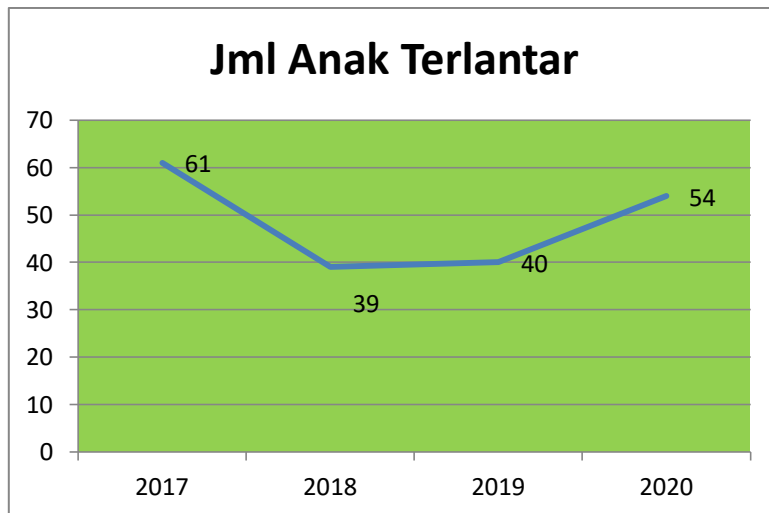
B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bukittinggi

1. Anak Terlantar

Anak terlantar sesuai dengan Permensos No. 08 Tahun 2012, merupakan seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Jumlah Anak terlantar di Kota Bukittinggi sejak tahun 2018 mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut .

Gambar 9.1. Jumlah Anak Terlantar Tahun 2017 sd 2020 di Kota Bukittinggi



2. Anak yang ditampung di panti Asuhan

Tabel 9.2. Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, sampai dengan 2020.

No	Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bukittinggi	94	94	96	96

Sumber : Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2020.

3. Bekas Warga Binaan lembaga pemasyarakatan

Tabel 9.3. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bukittinggi Tahun 2017, 2018 dan 2019

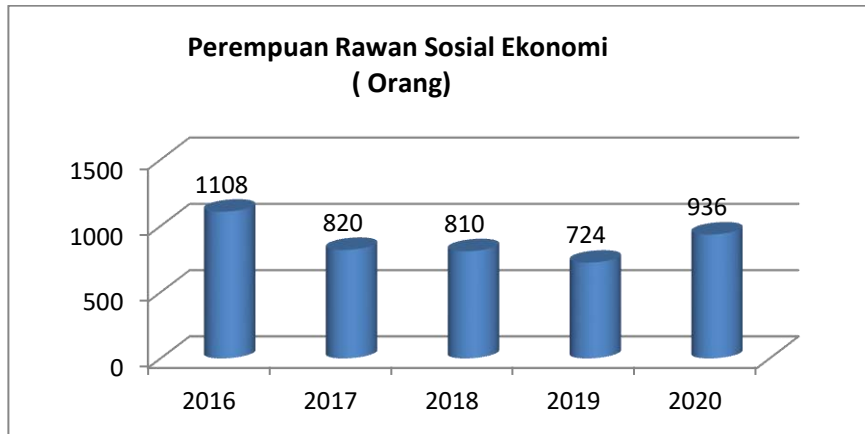
No	Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bukittinggi	15	-	2	0

Sumber: Dinsos Kota Bukittinggi Tahun 2020.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Permensos No 08 Tahun 2012, merupakan seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri, kemabli dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan secara normal. Menurut tabel diatas , jumlah bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) tahun 2020 tidak ada.

4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Gambar 9.2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sd 2020



Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan jumlah wanita rawan sosial ekonomi sampai dengan tahun 2019, akan tetapi disebabkan karena adanya pandemic Covid 19, maka terjadi peningkatan di tahun 2020.

5. Penyandang disabilitas

Disabilitas merupakan kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Terdapat empat jenis disabilitas yaitu:

- Disabilitas fisik: Amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, cerebral palsy (CP).
- Disabilitas intelektual: Down syndrome, kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.

- Disabilitas mental: Skizofrenia, demensia, afektif bipolar, retardasi mental.
- Disabilitas sensori: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.

Pengertian disabilitas ini memang cukup kompleks dan menggambarkan interaksi antara gerakan tubuh seseorang dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya.

Table 9.4 Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Penyandang Disabilitas
1	Guguk Panjang	91
2	Mandiingin Koto Selayan	80
3	Aur Birugo Tigo Baleh	24
Total	2019	195

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2020

Dari 195 penyandang disabilitas tahun 2019, terdapat anak disabel sebanyak 96 orang yang masih tergolong anak-anak.

6. Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2019

Tabel.9.5 Tabel Jumlah Pekerja Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Pekerja Sosial	Karang Taruna	Tenaga Kerja Sosial	Organisasi Sosial
1	Guguk Panjang	37	6	1	9
2	Mandiingin Koto Selayan	51	8	1	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	35	7	1	2
Total	2019	123	21	3	17
	2018	125	24	3	16
	2017	125	24	3	18

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2019

BAB X

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 14 tahun dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu Peraturan presiden republic Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan , bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hokum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang.

A. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tabel. 10.1 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut umur di kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelompok Umur			TOTAL
		0-<18	18->25	>25	
1	Guguk Panjang	2	1	4	7
2	Mandiingin K.Selayan	1	1	4	6
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	0	3	5
	JUMLAH	5	2	11	18

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan yang banyak adalah pada usia dibawah 18 tahun dan diatas 25 tahun . Bila dilihat rentang usia korban ini , maka disimpulkan korban merupakan kategori anak-anak, remaja dan kategori orang dewasa. Kasus tersebar di ketiga kecamatan.

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi dalam berbagai bentuk dan modus yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi belum didapatkan data yang akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan, karena stigma yang terjadi pada masyarakat adalah

rasa malu apabila mengadukan permasalahan kepada orang lain, sehingga kasus kekerasan khususnya yang terjadi di rumah tangga tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, terlihat pada table 9.2 dibawah, bahwa korban juga dialami oleh yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi.

Tabel. 10.2 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi Tahun 2020.

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekola h	Belum Tamat Sekola h	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Guguk Panjang	0	0	4	0	3	0
2	Mandiangan K.Selayan	0	0	3	0	1	2
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	2	0	3	0
	JUMLAH	0	0	9	0	7	2

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Terlihat pada table diatas bahwa perempuan korban kekerasan banyak terjadi pada tingkat pendidikan SD dan SLTA, yang berarti tindak kekerasan di Kota Bukittinggi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh factor intelektual/ kebodohan, tentunya banyak factor lain yang mempengaruhinya, seperti factor emosional, ekonomi dan hal-hal lainnya.

Tabel 10.3. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Status Pekerjaan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Berusa ha sendiri	Berusaha di bantu buruh tidak tetap	Buruh / Karyawan / Pegawai	Pekerjaan bebas di Pertanian	Pekerjaan bebas di Non Pertanian	Pekerjaan Keluarga	Pelajar/ lain-lain
1	Guguk Panjang	0	0	0	0	0	0	3
2	Mandiangan K.Selayan	0	0	2	0	0	0	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	1	0	0	0	2
	JUMLAH	0	0	3	0	0	0	6

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan terjadi berstatus pelajar dan buruh/ karyawan /pegawai,

Pelajar menjadi korban kekerasan pada umumnya disebabkan karena :

- anak terutama pelajar cenderung tidak akan mengadukan kekerasan yang di alami karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan.
- Anak sekolah mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang dewasa
- Tingkat ketakutan yang tinggi terhadap orang dewasa
- Penyalahgunaan gadget pada anak
- Mudah dibujuk rayu dengan pemberian uang atau hadiah

- Belum punya pengetahuan dan memahami tentang pendidikan seks
- Kurangnya pengawasan orang tua dan keluarga
- Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.

Tabel 10.4. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut status perkawinan di Kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai hidup
1	Guguk Panjang	3	3	1	0
2	Mandiangan K.Selayan	1	4	0	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	3	0	0
	JUMLAH	6	10	1	1

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi korban kekerasan terdiri atas korban yang berstatus kawin dan belum kawin.. Hal ini menggambarkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan banyak berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan jenis kekerasan dapat dilihat pada table dibawah ini .

Tabel 10.5. Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan di Kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Guguk Panjang	1	4	1	0	0	1
2	Mandiingin K.Selayan	4	2	0	0	0	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	2	1	0	0	2
	JUMLAH	5	8	2	0	0	4

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan adalah kekesarasan Psikis, Kekerasan psikis merupakan bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jadi, KDRT tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan semacamnya.

KDRT didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini ada empat macam KDRT dan kekerasan psikis termasuk diantaranya.

Kekerasan psikis dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT).

Tabel. 10.6 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Tempat kejadian di kota Bukittinggi Tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya
1	Guguk Panjang	4	0	3
2	Mandiingin K.Selayan	5	1	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	3	0	2
	JUMLAH	12	1	5

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi di rumah tangga.

Tabel. 10.7 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis Pelayanan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Penanganan pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi sosial	Penegakan & bantuan hukum	Pemulangan & reintegrasi
1	Guguk Panjang	6	1	0	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	6	0	0	2	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5	0	0	1	0
	JML	17	1	0	3	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Dari 18 orang yang datang ke P2TP2A , semua sudah dilaksanakan penanganan kasus.

Tabel. 10.8 Korban kekerasan terhadap perempuan menurut Frekuensi Kekerasan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1	Guguk Panjang	7	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	6	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	5	0	0
	JUMLAH	18	0	0

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Para korban perempuan yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, semua didominasi oleh kasus baru. Sehingga, mereka hanya melaporkan kejadiannya sekali dan dilanjutkan dengan konsultasi lanjutan. Pelaporan biasanya dilakukan setelah terjadi kekerasan fisik maupun psikis yang berulang. Saat perempuan itu sudah benar-benar tidak sanggup lagi menanggung kekerasan, mereka baru melaporkan kepada P2TP2A.

Tabel 10.9 Pelaku kekerasan terhadap perempuan menurut Tingkat Pendidikan di kota Bukittinggi.

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/ belum sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Guguk Panjang	0	1	0	1	5	0
2	Mandiingin K.Selayan	0	0	3	1	1	1
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	0	5	0
	JUMLAH	0	1	3	2	11	1

Sumber P2TP2A Kota Bukittinggi

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan dilakukan oleh orang yang juga berpendidikan, yang berarti bahwa pemicu terjadinya kekerasan adalah factor lain.

B. Kekerasan Terhadap Anak

Tabel. 10. 10 JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN DAN JENIS KELAMIN, PER KECAMATAN DI KOTA BUKITTINGGI													
NO	KEC	2020											
		JENIS KEKERASAN											
		FISIK		PSIKIS		SEKSUAL		EKSPLOITASI		PENELANTARAN		LAINNYA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	1
2	Mandiangi K.Selayan	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	4
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
JUMLAH		1	0	3	1	0	3	0	0	2	0	6	5

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Kekerasan pada anak biasanya terjadi secara Fisik, psikis dan sexual, penelantaran dan lainnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, adalah:

- 1) kekerasan fisik ; yang termasuk kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- 2) kekerasan psikologi/mental ; kekerasan ini meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditujukan kepada korban atau keluarga dekatnya.

- 3) kekerasan ekonomi; kekerasan ini adalah setiap perbuatan yang mengeksploitasi anak atau menelantarkan anggota keluarga, misalnya kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya.
- 4) kekerasan seksual; kekerasan mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, bentuk-bentuk tersebut misalnya menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, ucapan yang merendahkan, melecehkan atau menyakiti korban. Untuk kekerasan seksual ini, si pelaku biasanya orang dekat yang nekat melakukannya.

Tabel. 10.11 Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan, Per Kecamatan Di Kota Bukittinggi Tahun 2020

N O	KECAMATAN	R P T C	L B H	P K T	P P T	U P P A	TRAUMA CENTER	WOMAN CRISIS CENTER	SHELTER	RUMAH SINGGAH	RPSA	PANTI ASUAHAN ANAK	P2TP2A
1	Guguk Panjang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
2	MKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
3	Aur Birugo Tigo Baleh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
JUMLAH		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	19

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban kekerasan, melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah daerah. Di antara upaya yang dilakukan adalah pelayanan pelaporan/pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan korban secara pelayanan bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, konsultasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat. Selain itu, Bukittinggi juga menjadi pusat perdagangan dan wisata. Ini jelas berdampak pada kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencoba hadir dan memberi jalan keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan dan anak. Pada akhir tahun 2009 P2TP2A Saayun Salangkah didirikan di Kota Bukittinggi, yang operasionalnya dimulai pada tahun 2010.

Tabel. 10.12 Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak per Kecamatan Kota Bukittinggi
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN									
		PENANGANAN PENGADUAN		PELAYANAN KESEHATAN		REHABILITASI SOSIAL		PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM		PEMULANGAN & REINTEGRASI	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Guguk Panjang	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mandiingin K.Selayan	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aur Birugo Tigo Baleh	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : P2TP2A Kota Bukittinggi

Dampak kekerasan terhadap anak, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Kita bisa melihatnya dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap anak. Penyusunan itu kemudian digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan.

BAB XI

PENUTUP

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

1. Ketersediaan data

- a. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kota Bukittinggi untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah responsive gender.
- b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak.

2. Kependudukan

- a. Dari proyeksi penduduk Kota Bukittinggi tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sama dengan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 100%.

- b. Lebih dari seperempat penduduk perempuan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan kelangsungan generasi yang akan lahir, perhatian yang sangat dibutuhkan berupa kesehatan dan status gizi yang optimal serta perlunya dibekali dengan pengetahuan tentang pola asuh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak.
- c. Komposisi penduduk perempuan yang produktif perempuan yang produktif hampir sama banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang produktif.
- d. Pada tahun 2020 di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa 99,95 % penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP Elektronik, Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi dalam pengurusan KTP.
- e. 4212 orang atau 16,20% kepala keluarga di Kota Bukittinggi adalah perempuan, hal ini berarti perempuan haruslah memiliki kemampuan baik secara ekonomi, moral dan spiritual untuk menjadi pengambil keputusan di rumah tangganya.

3. Pendidikan

- a. perempuan memiliki akses pendidikan lebih baik dari pada laki-laki hal ini dapat dilihat dari persentase laki-laki yang bersekolah sebesar 80,95%, lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yaitu 81,7%.
- b. persentase penduduk Kota Bukittinggi berumur 19 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin tahun 2020 adalah sebesar 99.91% laki-laki dan 100% perempuan.

- c. angka putus sekolah di Bukittinggi pada tahun 2020 sebanyak 11,3%, berdasarkan data UNICEF, faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah.

4. Kesehatan

- a. Angka harapan hidup warga Bukittinggi selalu mengalami peningkatan hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2020 di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 6 Jiwa. Penyebab kematiannya adalah pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan.
- c. Persentase ibu hamil anemia di wilayah kerja dinas kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah sebesar 10,97%, sedangkan target nasional sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator persentase ibu hamil anemia di Kota Bukittinggi sudah tercapai.
- d. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di dinas kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah 5,3% Sedangkan target nasional sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) di Kota Bukittinggi sudah tercapai.
- e. Angka kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 7 kasus, diperlukan perhatian kesehatan khusus karena tubuh bayi usia kurang dari 1 bulan sangat lemah dan rentan terkena penyakit.
- f. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020 adalah 14,99% sedangkan target nasional sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator prevalensi

stunting pada balita di Kota Bukittinggi masih di bawah standar.

- g. Kasus baru HIV AIDS di Bukittinggi tahun 2020 ditemukan sebanyak 34 kasus
- h. Partisipasi KB aktif di tahun 2020 adalah sebanyak 11.072 orang sementara jumlah pasangan usia subur adalah 16.641 orang, maka CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) tahun 2020 adalah 66,53%.
- i. Usia perkawinan pertama sebagian besar warga Bukittinggi adalah pada usia 21 tahun lebih, terdapat 21,5% orang laki-laki menikah di usia kurang dari 25 tahun dan 19,9% perempuan yang menikah di usia muda kurang dari 21 tahun.

4. Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2020 sebanyak 69,84%, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019.
- b. Keterlibatan kerja perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, yaitu laki-laki 79,96% dan perempuan 60,51%.
- c. Status pekerjaan penduduk perempuan Kota Bukittinggi yang berumur 15 tahun keatas yang terbanyak adalah yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 12.590 (42,49%).
- d. Jumlah penduduk miskin di Kota Bukittinggi adalah 6.010 jiwa atau 4,54% penduduk Bukittinggi berada dibawah garis kemiskinan.

5. Politik dan Pengambilan Keputusan

- a. Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (legislatif), untuk dapat dipersiapkan duduk bersaing

dengan laki-laki menjadi caleg caleg yang dipercaya masyarakat

- b. Masih sedikitnya Pengambil keputusan di Kota Bukittinggi yang berjenis kelamin perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan perempuan.

6. Hukum dan Sosial Budaya

- a. Kebijakan-kebijakan yang responsif gender di Kota Bukittinggi sudah mulai digerakkan terbukti sudah terdapatnya beberapa SKPD yang sudah memprakarsai perencanaan yang berbasis gender.
- b. Permasalahan sosial masih memerlukan perhatian yang komprehensif dari semua pihak, karena pemecahan permasalahan sosial disebabkan oleh berbagai macam sebab, seperti ekonomi, keluarga, masyarakat dan pemahaman agama.

7. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan pada tahun 2019 belum dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua yang dilaporkan. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi ke masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat mempersiapkan data dan informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian yang mendalam terhadap hasil analisa dan peranan masing-masing lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi.